



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 19 TAHUN 2012

T E N T A N G

GRAND DESIGN DAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, maka dipandang perlu melakukan reformasi birokrasi dengan menetapkan Grand Design Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim ;
- b. bahwa penetapan Grand Design Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10 Seri E) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 22 Seri D) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 23 seri D) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24 Seri D) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 25 Seri D) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GRAND DESIGN DAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN MUARA ENIM

Pasal I

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Muara Enim.

Program Reformasi Birokrasi Kabupaten Muara Enim meliputi :

1. Quick Wins
2. Program Manajemen Perubahan
3. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
4. Program Penataan dan Penguatan Organisasi
5. Program Penataan Tatalaksana
6. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
7. Program Kegiatan Pengawasan
8. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja
9. Program Peningkatan Pelayanan Publik
10. Program Monitoring dan Evaluasi

Pasal 3

Grand Design Reformasi Birokrasi dan Road Map sebagaimana dimaksud Pasal 1 dijadikan acuan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik di Kabupaten Muara Enim.

Pasal 4

Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Muara Enim.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di : Muara Enim
pada tanggal : 7 Mei 2012

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 7 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

TAUFIK RAHMAN

Lampiran 1 : Peraturan Bupati Muara Enim
Nomor : 19 Tahun 2012
Tentang : Grand Design dan
Road Map Reformasi
Birokrasi Kabupaten
Muara Enim

BAGIAN SATU

INFORMASI DASAR

- I. NAMA PEMERINTAH DAERAH : PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
- II. ALAMAT : (Berisi informasi alamat dan kontak Pemerintah Kabupaten Muara Enim)
- III. TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI - PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Muara Enim terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Pendukung (Satgas dan Pokja)

B. TIM PENGARAH

Tim Pengarah terdiri dari Ketua Tim, Sekretaris, dan anggota yang mempunyai tugas memberikan arahan dan pengendalian perencanaan, pelaksanaan, dan memobilisasi sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Kabupaten Muara Enim

SUSUNAN TIM PENGARAH

Ketua	:	
Telepon	:	
HP	:	
E-mail	:	
Sekretaris	:	
Telepon	:	
HP	:	
E-mail	:	
Anggota	:	
Telepon	:	
HP	:	
E-mail	:	

E-mail	:	
--------	---	--

B. TIM PELAKSANA

Tim Pelaksana terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan anggota-anggota yang bertugas mempersiapkan langkah-langkah operasional sesuai arahan dari Tim Pengarah, memberikan dukungan dan mengelola Tim Satgas dan Pokja agar program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan kabupaten Muara Enim dapat dilaksanakan

SUSUNAN TIM PELAKSANA

Ketua	:	
Telepon	:	
HP	:	
E-mail	:	
Wakil Ketua	:	
Telepon	:	
HP	:	
E-mail	:	
Sekretaris	:	
Telepon	:	
HP	:	
E-mail	:	
Wakil Sekretaris	:	
Telepon	:	
HP	:	
E-mail	:	
Anggota	:	
Telepon	:	
HP	:	
E-mail	:	

Anggota	:	
Telepon	:	
HP	:	
E-mail	:	
Anggota	:	
Telepon	:	
HP	:	
E-mail	:	
Anggota	:	
Telepon	:	
HP	:	
E-mail	:	
Anggota	:	
Telepon	:	
HP	:	
E-mail	:	
Anggota	:	
Telepon	:	
HP	:	
E-mail	:	

C. TIM PENDUKUNG (SATUAN TUGAS/SATGAS)

Tim Pendukung (Satuan Tugas/ Satgas) terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan anggota-anggota yang bertugas melaksanakan penyiapan dokumen-dokumen program-program reformasi birokrasi, Quick Wins, dan Manajemen Perubahan agar program dan kegiatan reformasi birokrasi dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi.

SUSUNAN TIM PENDUKUNG (SATGAS)

Ketua	:	
Telepon	:	
HP	:	
E-mail	:	
Sekretaris	:	
Telepon	:	
HP	:	
E-mail	:	
Anggota	:	
Telepon	:	
HP	:	
E-mail	:	
Anggota	:	
Telepon	:	
HP	:	
E-mail	:	
Anggota	:	
Telepon	:	

HP	:	
E-mail	:	
Anggota	:	
Telepon	:	
HP	:	
E-mail	:	
Anggota	:	
Telepon	:	
HP	:	
E-mail	:	

D. TIM PENDUKUNG (KELOMPOK-KELOMPOK KERJA/POKJA)

Tim Pokja memiliki tugas menyiapkan dokumen dan rencana umum program dan kegiatan yang meliputi:

- A. Pokja Manajemen Perubahan
- B. Pokja Penataan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- C. Pokja Manajemen SDM
- D. Pokja Monitoring dan Evaluasi
- E. Pokja Peningkatan Pelayanan Publik dan
- F. Pokja Quick Wins

SUSUNAN TIM PENDUKUNG (POKJA)

Koordinator Pokja A	:	
Telepon	:	
HP	:	
E-mail	:	
Anggota	:	
Telepon	:	

HP	:	
E-mail	:	
Anggota	:	
Telepon	:	
HP	:	
E-mail	:	
Anggota	:	
Telepon	:	
HP	:	
E-mail	:	
Anggota	:	
Telepon	:	
HP	:	
E-mail	:	
Anggota	:	
Telepon	:	
HP	:	
E-mail	:	
Koordinator Pokja B	:	
Telepon	:	
HP	:	
E-mail	:	
Anggota	:	
Telepon	:	
HP	:	
E-mail	:	
Anggota	:	

Telepon	:	
HP	:	
E-mail	:	
Anggota	:	
Telepon	:	
HP	:	
E-mail	:	
Anggota	:	
Telepon	:	
HP	:	
E-mail	:	
Anggota	:	
Telepon	:	
HP	:	
E-mail	:	
Koordinator Pokja C	:	
Telepon	:	
HP	:	
E-mail	:	
Anggota	:	
Telepon	:	
HP	:	
E-mail	:	
Anggota	:	
Telepon	:	
HP	:	
E-mail	:	

Anggota	1
Telepon	1
HP	1
E-mail	1
Anggota	1
Telepon	1
HP	1
E-mail	1
Anggota	1
Telepon	1
HP	1
E-mail	1
Koordinator Pokir D	1
Telepon	1
HP	1
E-mail	1
Anggota	1
Telepon	1
HP	1
E-mail	1
Anggota	1
Telepon	1
HP	1
E-mail	1
Anggota	1
Telepon	1
HP	1

E-mail	1	
Anggota	1	
Telepon	1	
HP	1	
E-mail	1	
Anggota	1	
Telepon	1	
HP	1	
E-mail	1	
Koordinator Pakja E	1	
Telepon	1	
HP	1	
E-mail	1	
Anggota	1	
Telepon	1	
HP	1	
E-mail	1	
Anggota	1	
Telepon	1	
HP	1	
E-mail	1	
Anggota	1	
Telepon	1	
HP	1	
E-mail	1	
Anggota	1	
Telepon	1	

HP	1	
E-mail	1	
Anggota	1	
Telepon	1	
HP	1	
E-mail	1	
Koordinator Pokja B	1	
Telepon	1	
HP	1	
E-mail	1	
Anggota	1	
Telepon	1	
HP	1	
E-mail	1	
Anggota	1	
Telepon	1	
HP	1	
E-mail	1	
Anggota	1	
Telepon	1	
HP	1	
E-mail	1	
Anggota	1	
Telepon	1	
HP	1	
E-mail	1	
Anggota	1	

Telepon	:
HP	:
E-mail	:

BAGIAN DUA

RENCANA UMUM PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI

I. LATAR BELAKANG

KONDISI UMUM LINGKUNGAN STRATEGIS

Kondisi umum lingkungan strategis menggambarkan suatu realitas empiris berbagai aspek yang mempengaruhi secara signifikan eksistensi dari Kabupaten Muara Enim saat ini ataupun pada masa yang akan datang. Beberapa lingkungan strategis yang kita asumsikan memiliki pengaruh yang sangat signifikan adalah geografis, demografi, kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Geografis

Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu kabupaten agraris di Provinsi Sumatera Selatan. Secara Geografis, Kabupaten Muara Enim terletak antara 4° sampai 6° Lintang Selatan dan 104° sampai 106° Bujur Timur dengan luas wilayah 9.140,50 Km². Kemudian, Batas-batas wilayah Kabupaten Muara Enim yakni : Sebelah Utara dengan Kabupaten Musi Banyuasin dan Palembang; Sebelah Selatan dengan Kabupaten OKU dan Ogan Komering Ulu Selatan; Sebelah Timur Kabupaten OKI, Ogan Ilir dan Kota Prabumulih; Sebelah Barat dengan Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Lahat.

Wilayah ini memiliki kondisi topografi yang bervariasi mulai dari dataran tinggi, dataran rendah dan rawa-rawa. Daerah dengan dataran tinggi merupakan rangkaian dari pengunungan Bukit Barisan yang meliputi Kecamatan Semende Darat Laut, Semende Darat Ulu, Semende Darat Tengah dan Kecamatan Tanjung Agung. Daerah dataran

rendah, berada dibagian tengah. Sedangkan, daerah rawa yang berhadapan langsung dengan daerah aliran Sungai Musi. Daerah ini meliputi Kecamatan Talang Ubi, Penukal Utara, Penukal Abab, Tanah Abang, Lembak, Gelumbang, dan Sungai Rotan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Muara Enim (41,3 persen) terletak pada kemiringan lereng 3° - 12° dan 34,4 persen dengan kemiringan 0° - 3° . Sedangkan lainnya memiliki kemiringan lebih dari $>12^{\circ}$.

Selanjutnya secara administrative, wilayah Kabupaten Muara Enim terbagi menjadi 22 Kecamatan dan 310 desa definitif/desa persilahan dan 16 Kelurahan. Pada tahun sebelumnya, Kabupaten Muara Enim hanya mempunyai 305 desa dan 16 kelurahan. Lima desa yang baru terbentuk berada di Kecamatan Rambang (Sugih Waras Barat), Gunung Megang (Simpang Tanjung), Rambang Dangku (Kuripan Selatan), Tanah Abang (Raja Barat), dan Abab (Pengabuan Timur). Wilayah kecamatan paling luas adalah Kecamatan Lubai dengan luas wilayah 10,8 persen dan paling sempit adalah Kecamatan Tanah Abang dan Kecamatan Kelakar dengan luas wilayah 1,7 persen dari wilayah Kabupaten (lihat Tabel 1).

Tabel 1: Penyebaran Penduduk Kab. Muara Enim per Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	Jlh Pendd	Rasio Kepadatan
1.	Semende Darat Laut	274,75	12 895	47
2.	Semende Darat Ulu	466,60	15 805	34
3.	Semende Darat Tengah	419,93	9 685	23
4.	Tanjung Agung	539,97	37 516	69
5.	Rambang	522,62	27 479	53
6.	Lubai	984,72	52 773	54
7.	Lawang Kidul	380,84	62 887	165
8.	Muara Enim	203,80	61 585	302
9.	Ujan Mas	268,70	23 214	86
10.	Gunung Megang	666,40	56 405	85
11.	Benakat	288,52	8 764	30
12.	Rambang Dangku	628,24	50 455	80
13.	Talang Ubi	648,40	67 258	104
14.	Tanah Abang	156,60	27 237	174
15.	Penukal Utara	416,00	20 794	50
16.	Gelumbang	644,20	53 829	84
17.	Lembak	388,07	30 940	80
18.	Sungai Rotan	296,14	29 995	101
19.	Penukal	272,00	26 978	99
20.	Abab	347,00	23 207	67
21.	Muara Belida	176,00	7 594	43
22.	Kelekar	151,00	9 381	62

Sumber : Muara Enim Dalam Angka 2010

Demografis

Pada tahun 1990 jumlah penduduk Kabupaten Muara Enim sebanyak 587.556 orang dan pada tahun 2000 sebanyak 588.888 orang atau terjadi pertumbuhan sebesar 1,98 persen per tahun. Laju pertumbuhan tersebut lebih kecil dibandingkan kurun waktu 1980-1990 yang melaju dengan 3,15 persen per tahun. Selanjutnya tahun 2010, Jumlah menjadi 716.676 atau dengan laju pertumbuhan penduduk 2,0 persen per tahun. Pertumbuhan penduduk Muara Enim adalah lebih tinggi dibanding dengan rata-rata pertumbuhan penduduk nasional sebesar 1,3 persen.

Persebaran penduduk menurut kecamatan di wilayah Kabupaten Muara Enim tidak merata. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Talang Ubi, Lawang Kidul, dan Muara Enim. Ketiga kecamatan tersebut dihuni oleh sekitar 26,75 persen penduduk Kabupaten Muara Enim. Sementara kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Muara Belida (1,06 persen). Penyebaran penduduk per kecamatan seperti pada Tabel 1 di atas.

Sosial, Ekonomi, dan Politik

Sosial

Aspek sosial disini pembahasan difokuskan pada tiga bidang dasar yakni pendidikan, kesehatan dan agama di Kabupaten Muara Enim. Paparan kondisi berikut disajikan berdasarkan data dan informasi tahun 2010.

Pada bidang pendidikan, Jumlah sarana pendidikan pada semua jenjang mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 jumlah sekolah TK sebanyak 110 atau bertambah 23,6 persen dibanding tahun 2009. Jumlah sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah (MI) sebanyak 507 atau meningkat 2,01 persen. Pada tingkat SLTP/MTs terdapat 153 sekolah atau meningkat 12,5 persen. Sedangkan Sekolah SMU/SMK/MA pada tahun ini menjadi 78 atau meningkat 5,4 persen. Selain itu juga jumlah tenaga pengajar juga mengalami peningkatan. Jumlah guru TK pada tahun 2010 sebanyak 436 orang, meningkat 7,13 persen dari tahun 2009. Guru SD/MI sebanyak 6.254 meningkat 35,75 persen. Untuk tingkat SLTP/MTs jumlah guru sebanyak 2.479 orang atau naik 26,61 persen dari tahun 2009. Sedangkan pada sekolah SMU/SMK/MA terdapat 1.592 guru, meningkat 14,04 persen. Seiring dengan peningkatan sarana dan guru, Partisipasi sekolah juga mengalami peningkatan. Partisipasi TK meningkat 9,07 persen, SD/MI meningkat 3,92

persen, SLTP/MTS meningkat 3,24 persen dan SMU/SMK/MA meningkat 7,32 persen dibanding tahun 2009.

Pada tahun 2010, Kabupaten Muara Enim telah memiliki beberapa sarana kesehatan, yakni 3 buah rumah sakit, 24 unit puskesmas dan 107 unit puskesmas pembantu. Sedangkan untuk tenaga kesehatan telah memiliki 101 dokter, 13 Apoteker, 185 Sarjana Kesehatan, 804 tenaga keperawatan, 571 Bidan, dan 198 Non Medis. Peningkatan sarana dan tenaga kesehatan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sehingga pelayanan kesehatan mudah terjangkau, baik dari segi finansial maupun dari segi lokasi. Selanjutnya, dalam bidang Keluarga Berencana (KB), pertumbuhan akseptor lebih 14,18 persen dari target (40.807 akseptor). Angka tersebut naik 8,06 persen dibanding pencapaian peserta KB baru tahun sebelumnya. Tiga macam alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan peserta KB baru adalah suntikan, pil, dan implant. Suntikan digunakan oleh 19.158 akseptor atau sebanyak 46,95 persen; pil 15.934 akseptor atau 39,05 persen; dan Implant 3.047 akseptor atau 7,47 persen. Begitu juga dengan peserta KB Aktif, suntikan digunakan oleh 53.587 akseptor atau 41,74 persen; pil 43.161 akseptor atau 33,62 persen; dan Implant 19.969 akseptor atau 15,55 persen.

Selain hal tersebut diatas, Kabupaten Muara Enim sebagai masyarakat religious juga sangat memperhatikan kehidupan keagamaannya. Fasilitas peribadatan antara lain masjid, mushola, pura, dan gereja jumlahnya tetap, sedangkan vihara berkurang satu. Jumlah masjid sebanyak 596 unit, mushola sebanyak 133 unit, pura sebanyak 5 unit, gereja katolik sebanyak 1 unit, gereja protestan sebanyak 14 unit, dan vihara sebanyak 2 unit. Sedangkan jumlah jemaah haji Kabupaten Muara Enim pada tahun 2010 sebanyak 193 orang atau menurun 25,5 persen dibanding tahun lalu.

Ekonomi

Dimensi ekonomi mendeskripsikan tentang kondisi ekonomi sektoral dan juga berbagai indikator makro perekonomian. Beberapa sektor yang dibahas dalam bab ini adalah pertanian, pertambangan, energy, ekspor, industry dan perdagangan, transportasi, telekomunikasi, dan pariwisata. Sedangkan indikator makro ekonomi yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

a. Pertanian

Kabupaten Muara Enim merupakan daerah agraris dengan fokus terutama perkebunan. Luas lahan yang digunakan untuk perkebunan yakni 96,19 persen dan sisanya merupakan lahan sawah. Lahan perkebunan, yaitu seluas 340.533 Ha, hutan rakyat seluas 85.805 Ha.

Penggunaan lahan yang masih relatif kecil adalah untuk kolam/tebat/empang seluas 2.081 Ha.

Hasil tanaman pangan Kabupaten Muara Enim mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Tanaman pangan tersebut meliputi tanaman padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kacang kedele. Tanaman padi sebesar 251.268 ton atau meningkat 7,86% dibandingkan tahun 2009. Selanjutnya komoditas palawija juga mengalami peningkatan produksi, kecuali produksi kedele yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sedangkan, Produksi buah-buahan secara umum mengalami sedikit penurunan. Namun, beberapa jenis tanaman buah-buahan seperti mangga, nanas, pisang, sawo dan pepaya mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan untuk komoditas sayur-sayuran pada tahun 2010 produksinya secara umum meningkat dibanding tahun 2009.

Komoditas perkebunan yang menonjol di kabupaten Muara Enim adalah karet, kelapa sawit dan kopi. Luas tanam komoditas di atas mengalami peningkatan dibanding tahun 2009, demikian pula produksinya terutama produksi kelapa sawit yang meningkat cukup tajam.

Semua jenis ternak besar (sapi, kerbau, dan kuda) mengalami kenaikan populasi dibanding tahun lalu, populasi sapi naik 1 persen, kerbau naik 0,81 persen, dan kuda naik sebesar 1,43 persen. Untuk populasi ternak kecil (kambing, domba dan babi), juga mengalami peningkatan populasi. Populasi unggas, juga mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun lalu. Selanjutnya untuk seluruh jenis ternak potong mengalami kenaikan yakni sapi 0,98 persen kerbau 1,52 persen, kambing 1,31 persen, domba 1,33 persen, ayam ras 1,29 persen.

Selanjutnya, produksi perikanan pada tahun 2010 berjumlah 7.956,3 ton terdiri atas 4.049,18 ton hasil penangkapan dan 3.907,12 ton hasil budidaya perikanan. Dibanding tahun lalu, total produksi mengalami peningkatan 15,75 persen. Peningkatan ini, berasal dari produksi hasil penangkapan yang naik sebesar 2 persen dan produksi budidaya naik sebesar 34,55 persen.

b. Pertambangan-Energi, Listrik dan Air

Sektor pertambangan berperan cukup besar dalam perekonomian Kabupaten Muara Enim, baik komposisi dengan migas maupun tanpa migas. Dalam komposisi dengan migas, peranan dominan sektor pertambangan dibentuk oleh dominasi produk minyak dan gas bumi, sementara dalam komposisi tanpa migas, sumbangan batubara masih cukup dominan. Jumlah produksi batubara tahun 2010 tercatat sebanyak 11.948.767 ton atau naik 3,54 persen dari tahun lalu yang mencapai 11.540.720 ton. Sedangkan produksi

briket batubara turun 88,64 persen dibanding tahun lalu. Selanjutnya, Potensi bahan galian gol. C di Kabupaten Muara Enim mencapai 232.802 ton/m³. Produksi terbesar berasal dari pasir bangunan.

Listrik Tenaga Uap (LTU) Tanjung Enim merupakan pembangkit listrik berskala besar. Pembangunannya tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di wilayah Sumatera bagian selatan yang dihubungkan melalui jaringan transmisi Interkoneksi Sumatera bagian selatan. Daya terpasang pembangkit listrik PLTU Tanjung Enim tahun ini mengalami penurunan dibandingkan setahun yang lalu, yaitu dari sebesar 260.000 Kw menjadi 215.759 Kw. Tenaga listrik yang dibangkitkan juga mengalami penurunan dari 1.753.805 Mwh menjadi 1.609.073 Mwh atau 8,25 persen lebih rendah dari produksi tahun sebelumnya.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan air minum yang bersih dan sehat, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui PDAM terus berusaha untuk meningkatkan penyediaan air minum. Air minum yang disalurkan pada tahun 2010 berjumlah 3.791.427 m³ atau naik 0,60 persen dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 3.768.867 m³. Penggunaan terbanyak dari air minum yang disalurkan adalah untuk rumah tangga, yaitu sekitar 88,11 persen dari total air minum yang disalurkan. Dilikuti penggunaan air untuk instansi/kantor pemerintah; serta toko, industri dan perusahaan, masing-masing sekitar 4,04 persen dan 3,57 persen dari jumlah air minum yang disalurkan.

c. Ekspor, Industri, Dan Perdagangan

Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu wilayah pertambangan terbesar di Sumatera Selatan. Pada tahun 2010, dari total produksi batubara, sebanyak 4.449.843 ton dipasarkan ke luar negeri dengan nilai 2.724.842 juta rupiah, 7.584.652 ton diekspor ke luar Sumatera Selatan dengan nilai 4.770.817 juta rupiah, dan 975.313 ton dengan nilai 425.868 juta rupiah dipasarkan dalam wilayah Sumatera Selatan. Sedangkan, Briket batubara yang diekspor ke luar Sumsel sebanyak 88 ton briket dengan nilai 176 juta rupiah, dan untuk pemasaran dalam wilayah Sumsel sebanyak 88 ton dengan harga jual 176 juta rupiah.

Perusahaan industri di Kabupaten Muara Enim dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu : (1) Industri Besar; (2) Industri Sedang, dan (3) Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga (IKKRT). Perusahaan industri besar/sedang tahun 2010 sebanyak 19 buah dan industri kerajinan rumah tangga sebanyak 558 buah. Jumlah tenaga kerja yang dapat

ditanampung yaitu sebanyak 8.466 orang untuk perusahaan industri besar/edang, dan 2.292 orang untuk industri kecil dan kerajinan rumah tangga.

Selanjutnya, berdasarkan data tahun 2010, aktifitas perdagangan lebih didominasi oleh perdagangan pasar tradisional. Pasar berada di daerah-daerah perkotaan, seperti di Muara Enim dan Tanjung Enim, dan beberapa ibukota kecamatan lain seperti Talang Ubi dan Tanah Abang. Di Kecamatan Muara Enim terdapat satu pasar, yang mampu menampung 1.032 pedagang. Di Tanjung Enim terdapat 1 pasar dengan 889 pedagang. Selain di dua kota tadi, pasar yang cukup besar berada di Talang Ubi sebanyak 1 pasar yang mampu menampung 538 pedagang dan Tanah Abang Pendopo yang mampu menampung 353 pedagang. Sedangkan untuk di daerah pedesaan terdapat pasar kalangan. Hampir semua kecamatan mempunyai pasar kalangan, tetapi yang terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan hanya sebanyak 18 dari 103 pasar kalangan yang memberikan PAD (Pendapatan Asli Daerah), dimana mampu menampung 5.424 pedagang.

d. Transportasi

Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya usaha pembanguan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar arus lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lainnya. Panjang jalan di seluruh wilayah Kabupaten Muara Enim tahun 2010 mencapai 1.779,05 km. Panjang jalan yang berada di bawah wewenang negara sepanjang 191,22 km, di bawah wewenang pemerintah provinsi 217,09 Km, dan selebihnya 1.370,74 km di bawah wewenang Pemerintah Kabupaten. Dari total jalan kabupaten yang ada, sepanjang 1.122,48 km atau 81,9 persen berupa jalan aspal, sepanjang 114,87 km atau 8,4 persen jalan kerikil, dan sisanya 133,39 km atau 9,7 persen berupa jalan tanah dan beton. Dari seluruh jalan yang ada baik jalan nasional, provinsi maupun kabupaten, kondisi jalan pada umumnya yaitu sepanjang 905,71 Km atau 50,91 persen berada dalam kondisi baik, namun masih ada 228,29 km berada dalam kondisi rusak dan 34,74 km dalam kondisi rusak berat.

Jumlah bus yang tercatat di Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim tahun 2010 berjumlah 79 bus dengan jumlah daya angkut 45.170 penumpang. Lain halnya dengan angkutan truk, jumlah truk mengalami penurunan sebesar 32,08 persen atau dari 1.303 truk tahun 2009 menjadi 885 truk di tahun 2010. Pada periode yang sama, daya angkut menurun hingga 4,93 persen, atau dari 6.098.996 kg menjadi 5.798.040 kg.

e. Hotel, Restoran, Dan Pariwisata

Kabupaten Muara Enim mempunyai potensi wisata baik wisata alam, wisata satwa, maupun wisata budaya yang terletak di beberapa kecamatan di wilayah Muara Enim. Potensi ini perlu dikembangkan menjadi industri pariwisata. Data-data kepariwisataan sangat diperlukan untuk pengembangan perencanaan di bidang pariwisata. Pada tahun 2010, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Muara Enim mencapai 60.825 wisatawan. Jumlah tersebut naik sebesar 0,54 persen dibanding tahun lalu yang mencapai 60.500 wisatawan.

Sementara jumlah fasilitas penunjang pariwisata dan hiburan di Kabupaten Muara Enim pada tahun 2010 terdiri dari hotel/penginapan sebanyak 19 buah, restoran/rumah makan sebanyak 340 buah, dan tempat billiard sebanyak 11 buah. Jika dibandingkan tahun lalu maka terdapat penambahan satu unit hotel/penginapan dan lima unit restoran/rumah makan.

f. Keuangan Pemerintah Daerah

Realisasi penerimaan APBD Kabupaten Muara Enim tahun 2010 berasal dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lainnya. Realisasi penerimaan PAD tahun 2010 sebesar 65.655.885.592,93 rupiah atau turun sebesar 5,79 persen dibandingkan tahun lalu. Penerimaan PAD ini berasal dari penerimaan pajak sebesar 16.788.646.268,50 rupiah, retribusi daerah sebesar 10.675.926.444,00 rupiah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 7.908.103.430,71 rupiah, dan penerimaan lainnya sebesar 30.283.209.449,72 rupiah. Dana perimbangan tahun 2010 mencapai 877.390.018.799,00 rupiah. Penerimaan ini terdiri dari bagi hasil pajak sebesar 215.232.914.487,00 rupiah, bagi hasil bukan pajak sebesar 275.434.408.312,00 rupiah, Dana Alokasi Umum sebesar 371.879.096.000,00 rupiah dan Dana Alokasi Khusus sebesar 14.843.600.000,00 rupiah. Selanjutnya, Realisasi pengeluaran APBD Kabupaten Muara Enim tahun 2010 sebesar 952.304.700.811,63 rupiah. Realisasi pengeluaran ini sebesar 90,28 persen dari target anggaran 2010.

g. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator utama perekonomian di suatu wilayah. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi. Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi di kabupaten Muara Enim (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2010 mencapai Rp. 19.958.937 juta, sedangkan pada tahun 2009 sebesar Rp 17.923.618 juta. Struktur

ekonomi Kabupaten Muara Enim masih didominasi oleh sektor primer sebesar 73,62 persen. Sumbangan sektor primer terutama berasal dari sektor pertambangan yaitu sebesar 56,67 persen sedangkan sektor pertanian menyumbang 16,95 persen. Sektor sekunder memberikan kontribusi sebesar 11,55 persen terhadap PDRB Muara Enim. Sumbangan sektor sekunder terutama diberikan oleh sektor industri pengolahan yang mencapai 7,15 persen. Sumbangan sektor tersier terhadap PDRB Muara Enim sebesar 14,84 persen. Pada sektor ini sumbangan terbesar berasal dari sektor perdagangan yaitu sebesar 6,58 persen, sektor angkutan sebesar 2,05 persen, dan sektor-sektor jasa sebesar 5,01 persen.

Pada tahun 2010, tingkat pertumbuhan riil sektor ekonomi di kabupaten Muara Enim sebesar 5,34 % dengan migas dan bila tanpa migas mencapai 7,32%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2010 lebih baik dibandingkan tahun 2009 yang mencapai 4,73 % dengan migas dan 6,27 % tanpa migas. Sektor jasa-jasa mengalami laju pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 9,85 persen. Disusul kemudian oleh sektor pengangkutan dan komunikasi, yaitu sebesar 9,72 persen dan sektor bangunan yang tumbuh sebesar 9,29 persen. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian menunjukkan pertumbuhan yang relatif kecil dibanding sektor lainnya, yaitu 3,27 persen.

Selain untuk mengukur kinerja perekonomian, PDRB juga dapat digunakan untuk mengestimasi laju inflasi. Inflasi merupakan suatu indeks yang menggambarkan perubahan harga. Laju inflasi PDRB Kabupaten Muara Enim tahun 2010 sebesar 5,71 persen dalam struktur dengan migas dan 4,37 persen dalam struktur tanpa migas.

Pendapatan perkapita menunjukkan besarnya pendapatan yang dapat dinikmati oleh setiap penduduk secara rata-rata. Angka ini terbentuk dari jumlah pendapatan yang timbul (*income originated*) dibagi dengan jumlah penduduk. Pendapatan per kapita di Kabupaten Muara Enim dalam struktur ekonomi atas dasar harga berlaku dengan migas tahun 2010 tercatat 21,94 juta rupiah atau naik sebesar 9,42 persen dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan dalam struktur tanpa migas, pendapatan per kapita meningkat menjadi 13,43 juta rupiah atau naik sebesar 10,07 persen dibanding tahun sebelumnya.

Politik

Dimensi politik menggambarkan konstelasi kekuatan politik yang saat ini memegang peranan penting di Kabupaten Muara Enim. Berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2008, anggota DPRD Kabupaten Muara Enim berjumlah 45 orang. Partai dengan anggota terbanyak adalah PDIP dan Partai Golkar, yaitu masing-masing sebanyak 8 orang anggota diikuti Gerindra dan PKS yaitu masing-masing sebanyak 5 orang anggota. Partai lain yang

cukup besar jumlah anggotanya adalah Partai Demokrat dan PAN masing-masing dengan 4 orang anggota. Sisanya adalah partai-partai yang mendapatkan suara kurang dari 3 kursi.

Birokrasi pemerintah

Birokrasi memegang peranan penting demi tercapainya visi Kabupaten Muara Enim. Potret birokrasi Kabupaten Muara Enim bisa dipotret dari tiga dimensi, yakni sumber daya aparatur, ketatalaksanaan dan juga kelembagaan.

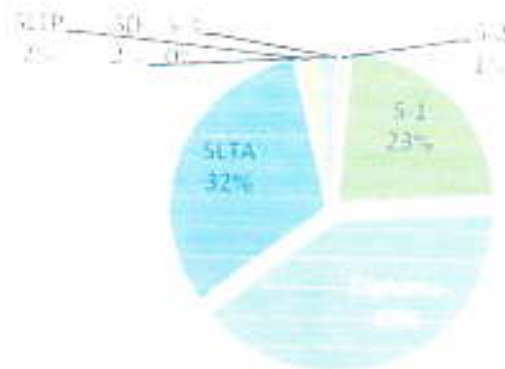
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Muara Enim pada tahun 2010 sebanyak 9.570 orang. Ditinjau dari golongannya, ternyata jumlah PNS ini terpusat pada golongan III. Persentase jumlah PNS golongan I, II, III, dan IV masing-masing adalah 1,38 persen; 29,49 persen; 48,36 persen; dan 20,77 persen.

Tabel 2 : Jumlah PNS Kabupaten Muara Enim Berdasarkan Unit Kerja

Dinas/Services	Golongan/Rank Status				Jumlah
	I	II	III	IV	
I. Sekretariat Daerah	1	84	124	28	218
II. Sekretariat DPRD	1	10	17	2	30
III. Dinas					
1. Kantor Tambahan Daerah					58
2. Pemerintahan dan Perhubungan			4		4
3. Perekonomian dan Energi			4		4
4. Kesehatan			4		4
5. Kehutanan			4		4
6. Perikanan			4		4
7. Tenaga Kerja dan Transmigrasi			4		4
8. Kesehatan, Perekonomian dan Energi			4		4
9. Dinas Cadangan Sipil			4		4
10. Dinas Koperasi dan Pengkreditan			4		4
11. Bina Marga			4		4
12. Pemukiman			4		4
13. Pendidikan Daerah			4		4
14. Koperasi dan PNT			4		4
15. Kesejahteraan Sosial			4		4
16. Kependudukan dan Catatan Sipil			4		4
17. Pemuda Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata			4		4
2010	62	2.195	2.705	1.850	7.815

Badan Kantor (Boards Services)		Jumlah Staf Status				Jumlah
		I	II	III	IV	
I	Badan					
	1. Badan					
	a. Badan					
	1. Badan					
	a. Badan					
	1. Badan					
	2. Badan					
	3. Badan					
	4. Badan					
	5. Badan					
	6. Badan					
	7. Badan					
	8. Badan					
	9. Badan					
	10. Badan					
	11. Badan					
	12. Badan					
	13. Badan					
	14. Badan					
	15. Badan					
	16. Badan					
	17. Badan					
	18. Badan					
	19. Badan					
	20. Badan					
	21. Badan					
	22. Badan					
	23. Badan					
	24. Badan					
	25. Badan					
	26. Badan					
	27. Badan					
	28. Badan					
	29. Badan					
	30. Badan					
	31. Badan					
	32. Badan					
	33. Badan					
	34. Badan					
	35. Badan					
	36. Badan					
	37. Badan					
	38. Badan					
	39. Badan					
	40. Badan					
	41. Badan					
	42. Badan					
	43. Badan					
	44. Badan					
	45. Badan					
	46. Badan					
	47. Badan					
	48. Badan					
	49. Badan					
	50. Badan					
	51. Badan					
	52. Badan					
	53. Badan					
	54. Badan					
	55. Badan					
	56. Badan					
	57. Badan					
	58. Badan					
	59. Badan					
	60. Badan					
	61. Badan					
	62. Badan					
	63. Badan					
	64. Badan					
	65. Badan					
	66. Badan					
	67. Badan					
	68. Badan					
	69. Badan					
	70. Badan					
	71. Badan					
	72. Badan					
	73. Badan					
	74. Badan					
	75. Badan					
	76. Badan					
	77. Badan					
	78. Badan					
	79. Badan					
	80. Badan					
	81. Badan					
	82. Badan					
	83. Badan					
	84. Badan					
	85. Badan					
	86. Badan					
	87. Badan					
	88. Badan					
	89. Badan					
	90. Badan					
	91. Badan					
	92. Badan					
	93. Badan					
	94. Badan					
	95. Badan					
	96. Badan					
	97. Badan					
	98. Badan					
	99. Badan					
	100. Badan					
	101. Badan					
	102. Badan					
	103. Badan					
	104. Badan					
	105. Badan					
	106. Badan					
	107. Badan					
	108. Badan					
	109. Badan					
	110. Badan					
	111. Badan					
	112. Badan					
	113. Badan					
	114. Badan					
	115. Badan					
	116. Badan					
	117. Badan					
	118. Badan					
	119. Badan					
	120. Badan					
	121. Badan					
	122. Badan					
	123. Badan					
	124. Badan					
	125. Badan					
	126. Badan					
	127. Badan					
	128. Badan					
	129. Badan					
	130. Badan					
	131. Badan					
	132. Badan					
	133. Badan					
	134. Badan					
	135. Badan					
	136. Badan					
	137. Badan					
	138. Badan					
	139. Badan					
	140. Badan					
	141. Badan					
	142. Badan					
	143. Badan					
	144. Badan					
	145. Badan					
	146. Badan					
	147. Badan					
	148. Badan					
	149. Badan					
	150. Badan					
	151. Badan					
	152. Badan					
	153. Badan					
	154. Badan					
	155. Badan					
	156. Badan					
	157. Badan					
	158. Badan					
	159. Badan					
	160. Badan					
	161. Badan					
	162. Badan					
	163. Badan					
	164. Badan					
	165. Badan					
	166. Badan					
	167. Badan					
	168. Badan					
	169. Badan					
	170. Badan					
	171. Badan					
	172. Badan					
	173. Badan					
	174. Badan					
	175. Badan					
	176. Badan					
	177. Badan					
	178. Badan					
	179. Badan					
	180. Badan					
	181. Badan					
	182. Badan					
	183. Badan					
	184. Badan					
	185. Badan					
	186. Badan					
	187. Badan					
	188. Badan					
	189. Badan					
	190. Badan					
	191. Badan					
	192. Badan					
	193. Badan					
	194. Badan					
	195. Badan					
	196. Badan					
	197. Badan					
	198. Badan					
	199. Badan					
	200. Badan					
	201. Badan					
	202. Badan					
	203. Badan					
	204. Badan					
	205. Badan					
	206. Badan					
	207. Badan					
	208. Badan					
	209. Badan					
	210. Badan					
	211. Badan					
	212. Badan					
	213. Badan					
	214. Badan					
	215. Badan					
	216. Badan					
	217. Badan					
	218. Badan					
	219. Badan					
	220. Badan					
	221. Badan					
	222. Badan					
	223. Badan					
	224. Badan					
	225. Badan					
	226. Badan					
	227. Badan					
	228. Badan					
	229. Badan					
	230. Badan					
	231. Badan					
	232. Badan					
	233. Badan					
	234. Badan					
	235. Badan					
	236. Badan					
	237. Badan					
	238. Badan					
	239. Badan					
	240. Badan					
	241. Badan					
	242. Badan					
	243. Badan					
	244. Badan					
	245. Badan					
	246. Badan					
	247. Badan					
	248. Badan					
	249. Badan					
	250. Badan					
	251. Badan					
	252. Badan					
	253. Badan					
	254. Badan					
	255. Badan					
	256. Badan					
	257. Badan					
	258. Badan					
	259. Badan					
	260. Badan					
	261. Badan					
	262. Badan					
	263. Badan					
	264. Badan					
	265. Badan					
	266. Badan					
	267. Badan					
	268. Badan					
	269. Badan					
	270. Badan					
	271. Badan					
	272. Badan					
	273. Badan					
	274. Badan					
	275. Badan					
	276. Badan					
	277. Badan					
	278. Badan					
	279. Badan					
	280. Badan					
	281. Badan					
	282. Badan					
	283. Badan					
	284. Badan					
	285. Badan					
	286. Badan					
	287. Badan					
	288. Badan					

Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Muara Enim seluruhnya sebanyak 1.872 orang dengan rincian 101 dokter, 13 Apoteker, 185 Sarjana Kesehatan, 804 tenaga keperawatan, 571 Bidan, dan 198 Non Medis.



Gambar 1 : Jumlah PNS berdasarkan Pendidikan

Sumber : RPJMD Kabupaten Muara Enim 2008 - 2013

Dari aspek kelembagaan, sebagai upaya untuk melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah maka disusunlah kelembagaan Kabupaten Muara Enim yang dalam hal ini mendasarkan kepada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muara Enim No. 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim, dan Perda Kabupaten Muara Enim nomor 12 s.d 17 tahun 2008 yang mengatur tentang struktur organisasi Kabupaten Muara Enim yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas, Inspektorat, Satpol PP, LTD, Kecamatan dan Kelurahan. Dalam pelaksanaannya, masih terjadi ketidakserasian kegiatan antar unit organisasi (OPD) di Kabupaten Muara Enim yang terkait dengan substansi dan cakupan kerja. Adapun susunan perangkat daerah Kabupaten Muara Enim terdiri dari:

Sekretariat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah no. 12 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 13 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim

Dinas sebanyak 17 Dinas berdasarkan Peraturan Daerah No. 14 tahun 2008 terdiri dari:

- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;

- b. Dinas Kesehatan ;
- c. Dinas Pendidikan;
- d. Dinas Sosial ;
- e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
- f. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
- g. Dinas Peternakan dan Perikanan;
- h. Dinas Perkebunan ;
- i. Dinas Kehutanan ;
- j. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- k. Dinas Pertambangan dan Energi ;
- l. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan ;
- m. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang ;
- n. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata,;
- o. Dinas Perhubungan ;
- p. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ;
- q. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Lembaga Teknis Daerah sebanyak 15 LTD berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim, terdiri dari:

- a. Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan terdiri dari :
 - Inspektorat Kabupaten;
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - Badan Kepegawaian Daerah;
 - Badan Lingkungan Hidup;
 - Badan Keluarga Berencana (KB) dan Pemberdayaan Perempuan;
 - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

- p. Kecamatan Lembak;
- q. Kecamatan Sungai Rotan;
- r. Kecamatan Penukal Utara;
- s. Kecamatan Benakat;
- t. Kecamatan Kelekar;
- u. Kecamatan Muara Belida;
- v. Kecamatan Abab.

Kelurahan sebanyak 16 yang berdasarkan pada Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan dalam Kabupaten Muara Enim terdiri dari:

- a. Kelurahan Pasar Tanjung Enim;
- b. Kelurahan Tanjung Enim;
- c. Kelurahan Tanjung Enim Selatan;
- d. Kelurahan Pasar I Muara Enim;
- e. Kelurahan Pasar II Muara Enim;
- f. Kelurahan Pasar III Muara Enim;
- g. Kelurahan Muara Enim;
- h. Kelurahan Tungkal;
- i. Kelurahan Talang Ubi Utara;
- j. Kelurahan Talang Ubi Selatan;
- k. Kelurahan Talang Ubi Barat;
- l. Kelurahan Talang Ubi Timur;
- m. Kelurahan Gelumbang;
- n. Kelurahan Handayani Mulia;
- o. Kelurahan Pasar Bhayangkara;
- p. Kelurahan Air Lintang.

Dari aspek ketatalaksanaan, Organisasi Perangkat Kabupaten Muara Enim diatur berdasarkan peraturan daerah mengenai susunan organisasi dan tata kerja. Namun demikian sebetulnya tatalaksana tidak hanya memerlukan aturan umum, karena

terkait dengan prosedur dan media (termasuk teknologi informasi dan komunikasi) dalam pelaksanaan suatu pekerjaan yang melibatkan beberapa unit organisasi.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Muara Enim, sejak tahun 2008 pemerintah Kabupaten Muara Enim telah mengembangkan dan menerapkan e-gov dalam bentuk portal Pemerintah Kabupaten, website beberapa SKPD/unit kerja dan beberapa system informasi manajemen sebagai basis pengelolaan informasi yang menggunakan teknologi informasi.

Beberapa portal dan website SKPD dimaksud adalah:

- <http://muaraenim.go.id>;
- <http://appatamuaraenim-tanjab.go.id>;
- <http://ajalimustawir.go.id>;
- <http://kpt.muaraenim-tanjab.go.id>;
- <http://per.muaraenim-tanjab.go.id>.

Sedangkan system informasi manajemen yang telah diterapkan adalah:

- Sistem informasi manajemen barang dan asset daerah (SIMBADA)
- Sistem informasi manajemen pendapatan daerah (SIMPATDA)
- Sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA)
- Sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG)
- Sistem informasi manajemen pengendalian pembangunan daerah (SIMDALBANGDA)
- Sistem informasi administrasi desa dan kelurahan (SLADEKA)
- Sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK)
- Sistem informasi administrasi kependudukan (SIK)
- Sistem informasi manajemen aplikasi manajemen perizinan (SIMAP)
- Sistem informasi manajemen nomor antrian pelayanan perizinan (SIMNAPP)
- Sistem informasi lingkungan (SIL).

Dengan mengamati website Kabupaten Muara Enim, diketahui bahwa dalam website tersebut telah tersedia menu yang dapat memudahkan pengguna mengetahui Perangkat Daerah, serta mengkontak mereka.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Muara Enim

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPM) 2008-2013, Kabupaten Muara Enim memiliki VISI sebagai terwujudnya Kabupaten Muara Enim Yang Sehat, Mandiri, dan Sejahtera di Bumi Serasan Sekundang. Berikut penjelasan beberapa indikator keberhasilan Visi Kabupaten Muara Enim.

- **SEHAT**

Masyarakat Kabupaten Muara Enim yang sehat baik jasmani maupun rohani yang ditandai oleh terpenuhinya kebutuhan fisik, rohani, perilaku hidup sehat, pelayanan kesehatan baik secara kualitas maupun kuantitas serta terciptanya lingkungan yang sehat.

- **MANDIRI**

Kabupaten Muara Enim yang mandiri bertumpu pada sumberdaya lokal, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pembangunan, berdaya saing, bersinergi dengan lembaga regional dan internasional dan daerah lainnya serta didukung oleh tersedianya SDM berkualitas, tersedianya dana pembangunan dari sumber sendiri, infrastruktur dan lembaga pemerintahan yang memadai serta kepastian hukum, sehingga sejajar dengan daerah lain.

- **SEJAHTERA**

Masyarakat Muara Enim yang sejahtera ditandai oleh terpenuhinya hak-hak dasar penduduk, meliputi kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, penghasilan yang layak, perumahan, lingkungan yang bersih, kehidupan beragama, kehidupan politik, keamanan dan kenyamanan serta pengembangan diri ke arah yang lebih baik.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkanlah beberapa misi yang relevan dengan kondisi faktual Kabupaten Muara Enim, yakni sebagai berikut:

- Visi mandiri diwujudkan melalui misi sebagai berikut :
 - a. Mewujudkan pengembangan ekonomi berbasis sumberdaya lokal
 - b. Mewujudkan Sumberdaya Manusia (SDM) berkualitas
 - c. Mewujudkan lembaga pemerintahan yang baik
 - d. Mewujudkan perekonomian yang mempunyai daya saing tinggi
- Visi sejahtera diwujudkan melalui misi sebagai berikut :
 - a. Mewujudkan masyarakat yang dapat memenuhi hak-hak dasar
 - b. Mewujudkan masyarakat yang semakin dapat mengaktualisasikan diri

SASARAN

- Sasaran sehat adalah sebagai berikut :
 - a. Terwujudnya masyarakat yang sehat jasmani
 - b. Terwujudnya masyarakat yang sehat rohani
- Sasaran mandiri adalah sebagai berikut :
 - a. Terwujudnya perekonomian daerah yang berbasis sumberdaya lokal (pertanian dan pertambangan) secara berkelanjutan
 - b. Terwujudnya pengembangan industri pengolahan yang berbasis pertanian
 - c. Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan pembangunan
 - d. Terwujudnya struktur perekonomian yang semakin proporsional
 - e. Terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan RTRW
 - f. Terwujudnya kerjasama antar lembaga, daerah dan antar negara
 - g. Terwujudnya SDM yang berkualitas dan menguasai IPTEK
 - h. Terwujudnya dana pembangunan dari sumber penerimaan lokal (peningkatan PADS)
 - i. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan memadai
 - j. Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik
 - k. Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi berkembangnya tata kelola pemerintahan yang baik

- l. Terwujudnya kepastian hukum
- m. Terwujudnya kehidupan yang lebih demokratis.

- Sasaran sejahtera adalah sebagai berikut :
 - a. Terwujudnya masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, dan papan) yang layak
 - b. Terwujudnya masyarakat yang sehat
 - c. Terwujudnya masyarakat yang berpendidikan
 - d. Terwujudnya masyarakat yang mempunyai pekerjaan yang layak
 - e. Terwujudnya masyarakat yang mempunyai lingkungan yang bersih
 - f. Terwujudnya masyarakat yang sadar berpolitik
 - g. Terwujudnya masyarakat yang taat menjalankan syariat agama
 - h. Terwujudnya keamanan dalam masyarakat
 - i. Terwujudnya masyarakat yang semakin dapat mengaktualisasikan diri.

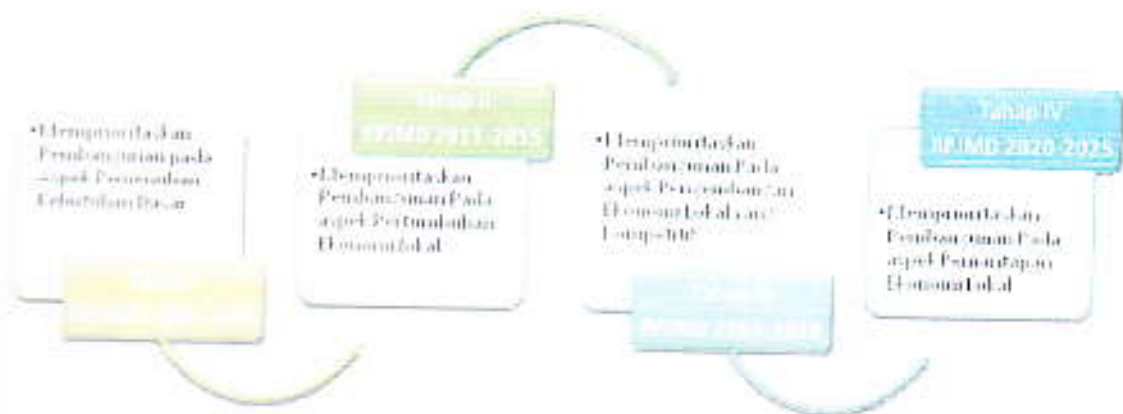
ARAH PEMBANGUNAN

- Arah pembangunan sehat adalah sebagai berikut :
 1. Meningkatkan penyediaan kebutuhan sandang, pangan dan papan
 2. Mendorong terciptanya masyarakat yang bermoral, berbudi luhur dan berakhlak mulia
 3. Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
 4. Mendorong peran serta masyarakat untuk berperilaku sehat dan menciptakan lingkungan yang sehat
- Arah pembangunan mandiri adalah sebagai berikut :
 1. Mendorong pembangunan ekonomi yang berbasis sumberdaya lokal (pertanian dan pertambangan) secara berkelanjutan
 2. Mendorong terwujudnya pengembangan industri pengolahan yang berbasis pertanian
 3. Mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan
 4. Mendorong berkembangnya ekonomi sektoral yang lebih proporsional

5. Mengendalikan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW
 6. Mendorong perekonomian daerah yang memiliki keunggulan kompetitif
 7. Mendorong terciptanya sinergi antar lembaga, wilayah, daerah dan antar negara dengan perekonomian lokal
 8. Mendorong tumbuh dan berkembangnya SDM yang berkualitas dan menguasai IPTEK
 9. Menyediakan dana pembangunan dari sumber penerimaan lokal (peningkatan PADS)
 10. Menyediakan infrastruktur yang berkualitas dan memadai
 11. Mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah
 12. Mendorong terciptanya pemerintahan yang baik
 13. Mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
 14. Mendorong terlaksananya kepastian hukum
 15. Mendorong kehidupan yang lebih demokratis.
- Arah pembangunan sejahtera adalah sebagai berikut :
 1. Mewujudkan masyarakat yang memiliki ketahanan pangan dan kelayakan sandang serta papan
 2. Meningkatkan kualitas kesehatan (peningkatan sarana dan prasarana kesehatan)
 3. Meningkatkan kualitas pendidikan (peningkatan sarana dan prasarana pendidikan)
 4. Mendorong peningkatan daya beli masyarakat
 5. Menyediakan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat
 6. Menyediakan lingkungan yang bersih
 7. Terwujudnya masyarakat yang sadar berpolitik
 8. Membangun masyarakat yang taat menjalankan syariat agama
 9. Meningkatkan kualitas keamanan dalam masyarakat
 10. Memberntuk masyarakat yang semakin dapat mengaktualisasikan diri.

TAHAPAN PEMBANGUNAN

Berdasarkan arah pembangunan tersebut, maka pembangunan jangka menengah Kabupaten Muara Enim dibagi dalam empat tahapan dengan prioritas khusus pada masing-masing tahapannya, sebagaimana Gambar 2 sebagai berikut :



Sumber: RPJMD Kabupaten Muara Enim, 2008

Gambar 2

Tahapan-tahapan dan prioritas RPJMD

Secara lengkap tahapan dan prioritas RPJM Kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut:

1. Tahap 1 RPJM I 2005-2010

Memprioritaskan Pembangunan pada Aspek Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Kehidupan Beragama, Pangan, Sandang, Papan, Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan, Lingkungan Yang Bersih, Keamanan, Kehidupan Berpolitik), Lembaga Kepemerintahan, Infrastruktur, Sumber Penerimaan Daerah dan Pendapatan Masyarakat yang Dapat Memenuhi Kebutuhan Dasar.

2. Tahap 2 RPJM II 2011-2015

Memprioritaskan Pembangunan Pada aspek Pertumbuhan Ekonomi Lokal Melalui Kerjasama antar Lembaga, Antar Wilayah, Peningkatan Kualitas SDM dan Iptek, Peningkatan Infrastruktur, Peningkatan Kualitas Lembaga pemerintahan, Sumber Penerimaan Daerah, Pendapatan Masyarakat)

3. Tahap 3 RPJM III 2016-2020

Memprioritaskan Pembangunan Pada aspek Pengembangan Ekonomi Lokal Yang Kompetitif Yang Ditopang Oleh Peningkatan Kerjasama antar Lembaga, Antar Wilayah, Peningkatan Kualitas SDM dan Iptek, Peningkatan Infrastruktur, Lembaga pemerintahan, Sumber Penerimaan Daerah, Pendapatan Masyarakat)

4. Tahap 4 RPJM IV 2021-2025

Memprioritaskan Pembangunan Pada aspek Pemanjatan Ekonomi Lokal, sehingga memiliki daya saing Melalui Pengembangan Kerjasama antar Lembaga, Antar Wilayah, Peningkatan Kualitas SDM dan Iptek, Peningkatan Infrastruktur, Lembaga pemerintahan, Sumber Penerimaan Daerah, Pendapatan Masyarakat)

PERMASALAHAN DAN AGENDA REFORMASI BIROKRASI

Seiring dengan tuntutan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Kabupaten Muara Enim sebagai pemerintah daerah yang diberikan mandat menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, terus melakukan persiapan yang serius. Diantaranya adalah dengan melakukan identifikasi atau diagnosis terhadap berbagai aspek yang diperlukan untuk menjalankan program reformasi birokrasi. Diantaranya adalah dari sisi organisasi atau kelembagaan, ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya aparatur.

Secara umum terdapat dua permasalahan fundamental terkait dengan pengorganisasian Kabupaten Muara Enim saat ini, yaitu permasalahan dari sisi internal dan permasalahan dari sisi eksternal.

Dari sisi internal, tiga aspek yang menjadi fokus perhatian adalah : kelembagaan, SDM dan ketatalaksanaan. Dari aspek kelembagaan, berbagai persoalan yang dihadapi Kabupaten Muara Enim saat ini adalah antara lain; (1) kurang terinternalisasinya visi dan misi bersama, (2) adanya ketidakserasian kegiatan antar unit organisasi, (3) kurang seimbangny struktur organisasi dengan beban kerja, (3) besarnya organisasi satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) yang ada; dan (4) kinerja penyelenggaraan pelayanan publik belum optimal.

Adapun dari aspek SDM berbagai permasalahan yang dihadapi Kabupaten Muara Enim saat ini antara lain; (1) Kabupaten Muara Enim belum memiliki perencanaan SDM yang sesuai dengan kebutuhan, (2) pengadaan CPNS belum didasarkan atas analisis beban kerja dan analisis jabatan, (3) penempatan pegawai belum disertai uraian tugas sehingga tidak mengetahui tugas dan tanggungjawabnya, (4) mutasi belum dikaitkan dengan alur karir pegawai karena ketidakadanya pola karir yang bisa dijadikan sebagai rujukan dalam pengembangan pegawai, (5) pola pembinaan pegawai belum tertata dengan baik, (6) masih kurangnya kualitas pegawai dilihat dari tingkat pendidikan dan spesialisasi, (7) belum optimalnya penguasaan kompetensi teknis pegawai, (8) belum adanya sistem pengukuran kinerja pegawai yang handal, (9) masih kurangnya pedoman-pedoman di bidang pengelolaan pegawai, (10) program dan jenis diklat belum sepenuhnya difokuskan pada upaya peningkatan kompetensi teknis pegawai, (11) lemahnya sistem informasi kepegawaian, (12) kurangnya kapasitas internal, (13) belum optimalnya peran kepemimpinan Kabupaten Muara Enim, (14) belum adanya keterkaitan sistem diklat dengan sistem pengembangan karir, dan (15) minimnya sumberdaya di bidang teknologi informasi.

Sedangkan dari aspek manajemen personalia berbagai persoalan yang dihadapi Kabupaten Muara Enim saat ini antara lain; (1) belum dilaksanakannya secara optimal berbagai pedoman yang telah dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan, (2) sistem perencanaan program kerja kurang terpola secara jelas, (3) lemahnya koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program, dan (4) minimnya penerapan manajemen pengelolaan yang berbasis teknologi informasi.

Dari sisi eksternal berbagai persoalan yang dihadapi Kabupaten Muara Enim saat ini dalam aspek organisasi antara lain; (1) masih terjadinya *overlapping* dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan dengan pemerintah provinsi dan Pusat, (2) adanya ketidakpastian/ kerancuan dalam substansi kewenangan urusan pemerintahan. Dalam aspek manajemen beberapa permasalahan yang muncul antara lain terjadinya *overlapping* program dan kegiatan antara Kabupaten Muara Enim dengan pemerintah provinsi dan pusat.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut di atas, Kabupaten Muara Enim menetapkan Reformasi Birokrasi sebagai cara terbaik dalam rangka merespon terhadap berbagai problematika tersebut. Program Reformasi Birokrasi dilakukan secara terencana, sistemik dan berkesinambungan. Program reformasi birokrasi Kabupaten Muara Enim mengacu kepada Peraturan Presiden No 81 tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Ada 8 area perubahan yang menjadi prioritas Reformasi Birokrasi Kabupaten Muara Enim, yakni : (1) Area perubahan kelembagaan; (2) area perubahan ketatalaksanaan; (3) area perubahan penataan perubahan peraturan perundang-undangan; (4) area perubahan bidang SDM; (5) area perubahan bidang pengawasan; (6) area perubahan bidang akuntabilitas; (7) area perubahan bidang pelayanan publik; (8) area perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*cultureset*) aparatur.

Area Perubahan Kelembagaan

Sebagai Pemerintah Daerah, Kabupaten Muara Enim mempunyai mandat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Kabupaten Muara Enim hanya akan mampu menyelenggarakan dan memberikan pelayanan publik yang prima jika satuan-satuan kerja yang ada dapat membangun kinerjanya secara optimal. Dengan kata lain, satuan kerja internal Kabupaten Muara Enim yakni Sekretariat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis Daerah (LTD), Rumah Sakit, Kecamatan dan Kelurahan, secara langsung harus mendukung dan/atau berkontribusi terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim, dan secara tidak langsung berkontribusi terhadap program reformasi birokrasi secara umum.

Penentuan perangkat daerah beserta tugas dan fungsinya yang merujuk pada kewenangan daerah serta berpedoman pada PP 41 tahun 2007 merupakan hasil dari upaya pengorganisasian. Sebagaimana dijelaskan pada bagian atas, organisasi perangkat daerah Kabupaten Muara Enim diatur dengan Peraturan Daerah No. 12-17 Tahun 2008. Jadi sejak ditetapkan sudah lebih dari 3 tahun perangkat daerah Kabupaten Muara Enim. Dalam kurun waktu tersebut, ternyata masih ditemukan beberapa persoalan kelembagaan seperti: tumpang tindihnya tugas dan fungsi, struktur yang masih gemuk, beban kerja yang belum terbagi secara proporsional, penyesuaian antara struktur dan visi daerah yang belum terlalu pas dan sebagainya. Secara rinci permasalahan-permasalahan kelembagaan tergambar dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2 : Permasalahan Kelembagaan Kabupaten Muara Enim

Permasalahan	Pendapat dan/atau Saran atas Masalah
Desain/Penataan Kelembagaan	• Perlunya dilakukan beberapa penyesuaian organisasi dengan perkembangan kebijakan yang terbaru (lahir setelah Perda No. 13-16/2008 keluar). ◦ Perlu penataan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Penanaman Modal karena keduanya terkait ◦ Susunan Organisasi dan Tata Kerja bidang Catatan Sipil perlu pengaturan yang jelas secara nasional • Perlunya pedoman penataan kelembagaan untuk mendapatkan perubahan yang signifikan.
Tugas, Fungsi dan Beban Kerja	• Belum adanya kejelasan tugas dan fungsi sehingga perlu dilakukan analisis peraturan daerah tentang tugas dan fungsi • Dengan penggabungan Bidang Perpustakaan dan Dokumentasi, dokumentasi arsip tidak berjalan dengan baik, sebaiknya Dokumentasi dilaksanakan oleh fungsi lain seperti humas • Ada indikasi tumpang tindih dari setiap SKPD, sehingga menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi. Hal ini perlu dikaji untuk memperoleh solusi yang tepat
Keselarasan dengan Provinsi dan Kewenangan	• Pada Urusan otda dan desa (provinsi tidak ada) • Pemberdayaan perenpuan (sudah tidak ada) • Keragaman Nomenklatur
Dukungan pelaksanaan Tugas dan Fungsi	• Penyerahan seluruh asset (kelembagaan, sdm dan petan) • Dalam melaksanakan tusi belum lengkap : (meningkatkan kemampuan sdm)- dalam tusi yang ada belum focus dalam hal ini • Masalah kualitas, kuantitas, produktifitas – bagaimana memanfaatkan sdm untuk peningkatan produktifitas ?

Sumber : Diskusi Kelompok Terfokus Kabupaten Muara Enim tanggal 26 Oktober 2011

Dengan teridentifikasinya berbagai permasalahan kelembagaan pada Kabupaten Muara Enim, maka dalam rangka reformasi birokrasi Kabupaten Muara Enim, diperlukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Penataan atau desain ulang kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Muara Enim sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- b. Evaluasi tugas dan fungsi masing-masing SKPD agar tidak terjadi *overlapping*

- c. Pengkajian beban kerja SKPD sebagai rujukan dalam penataan / desain ulang kelembagaan perangkat daerah dengan beban kerja yang seimbang
- d. Sinkronisasi kelembagaan SKPD Kabupaten Muara Enim dengan Kelembagaan SKPD di tingkat Provinsi dan dengan kewenangan daerah
- e. Penataan kembali sumber daya organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi

Dengan upaya tersebut diharapkan dapat memperoleh bekal pelaksanaan reformasi kelembagaan perangkat daerah berupa:

- a. Tersusunnya kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Muara Enim yang sesuai dengan peraturan perundangan dan juga kebutuhan factual Kabupaten Muara Enim;
- b. Teridentifikasinya tugas fungsi yang lumpang tindih antara SKPD, sehingga dapat dijadikan bahan penataan tugas dan fungsi SKPD yang lebih baik;
- c. Teridentifikasinya beban kerja setiap unit organisasi, sehingga dapat dijadikan justifikasi dalam penggabungan bidang dengan beban kerja yang seimbang;
- d. Terjadinya keselarasan kelembagaan SKPD Kabupaten Muara Enim dengan Kelembagaan SKPD di tingkat Provinsi dan dengan kewenangan daerah
- e. Kesesuaian antara tugas, fungsi dan beban kerja organisasi dengan alokasi sumber daya (aparatur dan aset)

Area Perubahan Ketatalaksanaan

Pada aspek ketatalaksanaan Kabupaten Muara Enim telah menggunakan teknologi informasi sebagai basis pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan. Hal ini bisa dilihat dari berbagai portal informasi baik yang di tingkat Kabupaten maupun yang dikembangkan masing-masing satuan kerja. Selain itu, untuk mendukung jaringan system informasi yang berperan sebagai *back office* maupun intranetnya, juga telah dikembangkan berbagai system informasi manajemen yang mempermudah dalam pengambilan keputusan dan koordinasi seperti kepegawaian, keuangan daerah, kependudukan dan lainnya. Namun demikian, e-office atau e-gov yang dikembangkan masih bersifat informative, belum mengarah kepada fasilitas transaksional apalagi kepada tahapan akhir yang membentuk jejaring informasi yang terhubung dengan setiap satuan kerja pemerintah (*connected governance*).

Dimensi ketatalaksanaan yang juga memiliki hubungan terhadap peningkatan kinerja organisasi adalah adanya sistem baku yang mengatur proses bisnis organisasi. Sistem tersebut sering disebut sebagai *standard operating procedures (SOP)*. Beberapa satuan kerja organisasi perangkat daerah Kabupaten Muara Enim telah memiliki SOP, paling tidak beberapa satuan kerja yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Namun demikian untuk kepentingan reformasi birokrasi, maka setiap aktifitas atau proses bisnisnya harus dibuatkan SOP sebagai pedoman untuk menjalankan tugas.

Terkait dengan hal tersebut, melalui diskusi kelompok terfokus dapat diidentifikasi beberapa permasalahan terkait dengan tatalaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3: Permasalahan Tatalaksana Kabupaten Muara Enim

Permasalahan	Pendapat dan/atau Saran atas Masalah
Penggunaan IT pada tata laksana SKPD pada Umumnya	▪ Pada umumnya SKPD belum banyak menggunakan IT dalam tatalaksana pelaksanaan kegiatannya
Penggunaan IT pada pengadaan barang dan jasa	▪ Penggunaan IT dalam pengadaan barang dan jasa masih sulit dilakukan, terutama dalam melaksanakan pelelangan tender.
Tata laksana pada fungsi pendukung dan fungsi substantif	▪ Pelaksanaan tugas Sekretariat KPU – substansi (membantu, memfasilitasi, melayani) mengolah keuangan ▪ KPU kota sebagai KPA sering terjadi miskomunikasi – karena sering diisi orang non partisipan – terhadap pelaksanaan tugas. ▪ Penjabaran pelaksanaan tugas belum jelas (propinsi/kabupaten/kota)

Sumber : Diskusi Kelompok Terfokus Kabupaten Muara Enim tanggal 26 Oktober 2011

Hasil identifikasi permasalahan ketatalaksanaan pada Kabupaten Muara Enim mencerminkan belum adanya penggunaan SOP dan teknologi informasi dan komunikasi. Padahal hal tersebut adalah krusial diperlukan. SOP sangat diperlukan pada unit-unit pelaksana yang bersifat teknis seperti keuangan, perbendaharaan, serta pelayanan dan regulasi. Terlebih pada pelaksanaan kegiatan yang bersifat lintas level, antara Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten/Kota lainnya ataupun dengan Provinsi. Selain itu penggunaan teknologi informasi menjadi suatu kewajiban sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Pelayanan Publik yang harus menyediakan media komunikasi yang mudah untuk menyalurkan keluhan dan memungkinkan respon yang cepat, Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Presiden terkait dengan Pengadaan Barang dan

Jasa utamanya dalam rangka pelelangan tender, dan dalam Peraturan Pemerintah terkait dengan pengadaan pegawai negeri.

Untuk itu peningkatan tatalaksana dalam rangka reformasi birokrasi Kabupaten Muara Enim, diperlukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Perancangan dan pembuatan website dan perintisan e-gov Kabupaten dan setiap perangkat daerah Kabupaten Muara Enim, terutama dengan tugas dan fungsi yang berdasarkan peraturan perundangan wajib menggunakan IT, seperti Sekretariat Daerah pada unit pengadaan barang dan jasa, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Kepegawaian Daerah; pengutamaan ini bukan berarti bahwa pembuatan website / penerapan e-gov pada instansi lainnya tidak penting, tetapi mengingat bahwa setiap kegiatan dibatasi pada sumber daya anggaran, maka alangkah baiknya jika dilakukan secara bertahap sesuai dengan prioritas berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Penyusunan *Standard Operating Procedure (SOP)* kegiatan pada setiap perangkat daerah Kabupaten yang melibatkan beberapa unit dan level pemerintahan

Dengan upaya tersebut diharapkan dapat memperoleh bekal pelaksanaan reformasi tata laksana perangkat daerah berupa:

- a. Tersedianya media tatalaksana perangkat daerah Kabupaten Muara Enim yang sesuai dengan peraturan perundangan;
- b. Tersusunnya *Standard Operating Procedure (SOP)* yang menjadi standar baku prosedur pelaksanaan tugas yang melibatkan beberapa unit/organisasi/level pemerintahan.

Area Perubahan Peraturan Perundang-undangan

Dalam rangka reformasi birokrasi, kepastian hukum menjadi salah satu tolok ukur utama yang menentukan keberhasilan reformasi, terutama dalam mendukung terlaksananya wujud pemerintahan yang baik, yang melibatkan masyarakat dan swasta sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini pula yang menjiwai otonomi daerah, yang diharapkan dapat mendekatkan kebijakan publik dan layanan publik kepada masyarakat yang dilayaninya.

Terkait dengan kedua hal tersebut di atas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Muara Enim merumuskan dua hal terkait dengan hukum, yakni (1) dasar hukum yang kondusif untuk praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik,

sehingga diperlukan jaminan hukum yang pasti untuk menghindari konflik dan menumbuhkan kenyamanan dalam bermasyarakat, dalam Kajian yang pernah dilakukan Lembaga Administrasi Negara, masalah kepastian hukum terutama dirasakan dalam kaitannya dengan penanaman modal dan perencanaan wilayah; dan (2) mewujudkan masyarakat yang sadar hukum. Selain kedua tantangan di bidang hukum tersebut, terdapat permasalahan lain yang dikemukakan dalam diskusi terbatas sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4: Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan

Permasalahan	Pendapat dan/atau Saran atas Masalah
Sinkronisasi Peraturan pada Level Nasional	▪ Terdapat Peraturan perundangan yang tumpang tindih di tingkat pusat sehingga menyulitkan dalam pelaksanaannya
Sinkronisasi Peraturan antara Daerah dengan Pusat	▪ Seharusnya peraturan daerah mengenai catatan sipil mengikuti peraturan tentang Catatan Sipil dari pemerintah pusat

Sumber : Diskusi Kelompok Terfokus Kabupaten Muara Enim tanggal 26 Oktober 2011

Untuk itu dalam rangka reformasi birokrasi Kabupaten Muara Enim, dari aspek penataan peraturan perundangan diperlukan upaya-upaya sebagai berikut:

- Rancangan Peraturan Daerah tentang perencanaan wilayah yang matang dan ramah lingkungan sebagai dasar dalam pemberian ijin usaha dan investasi daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dalam melibatkan swasta untuk berperan membangun daerah
- Rancangan peraturan daerah tentang tata cara pelibatan partisipasi publik dalam perencanaan dan kebijakan daerah
- Rancangan peraturan daerah dan fasilitasi / sarana sosialisasi produk hukum /peraturan daerah Kabupaten Muara Enim
- Sinkronisasi Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim dengan Peraturan yang lebih tinggi

Dengan upaya tersebut diharapkan terbentuknya dukungan pelaksanaan pemerintahan yang baik dengan adanya:

- Kepastian hukum yang mendukung swasta berpartisipasi dalam pembangunan dan perekonomian daerah
- Kepastian hukum yang menjamin dibukanya partisipasi publik dalam perencanaan dan kebijakan daerah
- Kepastian hukum dan terfasilitasinya sosialisasi produk hukum Kabupaten Muara Enim
- Kekuatan hukum peraturan daerah Kabupaten Muara Enim dengan sinkronnya Peraturan Daerah dengan Peraturan pemerintah di atasnya

Area Perubahan Bidang Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil Brainstorming tanggal 26 Oktober 2011 dengan Seluruh SKPD Kabupaten Muara Enim teridentifikasi berbagai permasalahan bidang SDM sebagaimana tergambar dalam Tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5: Permasalahan SDM di Kabupaten Muara Enim

Permasalahan	Pendapat dan/atau Saran atas Masalah
Perlu pemerataan sebaran SDM	- Pada salah satu OPD terdapat 45 jabatan struktural namun hanya memiliki 5 staf (PNS), di luar itu terdapat banyak pegawai honorer. OPD tersebut memiliki UPTD, salah satu UPTD melayani 3 kecamatan namun hanya diisi oleh satu pegawai saja. Hal ini menggambarkan bahwa OPD tersebut masih sangat membutuhkan tambahan pegawai baru. - Kurangnya pegawai juga terjadi di pemadam kebakaran. - Penambahan SKPD baru sesuai dengan tuntutan peraturan yang ada, yakni Badan Penanggulangan Bencana yang berarti juga harus menambah jumlah pegawai. - Jumlah aparatur yang tidak memadai juga terjadi di kecamatan-kecamatan, dimana sekretaris merangkap kasi/bendara dan penjaga kantor. - Kendala SDM di RS Kab. Muara Enim pada tahun 2014 diproyeksikan kebutuhan tenaga kesehatan yang seharusnya 270 orang tapi saat ini hanya berjumlah 120 orang. - Pada unit perizinan terpadu, belum ada pegawai teknis - Belum ada tenaga fungsional pustakawan pada unit perpustakaan.
Rekrutmen Pegawai	- Ada intervensi dari berbagai kepentingan yang bermuatan politis. Sehingga, hasil rekrutment pegawai/pejabat struktural masih belum ideal. - Penataan agak sulit - terkait dengan muatan politis - pengangkatan dalam jabatan penuh intervensi. - kiat-kiat meminimalisir intervensi?

	▪ Penentuan pegawai terlalu banyak intervensi dari luar – perlu ada barisan – bagaimana cara untuk masalah ini ?
Profesionalisme Pegawai	▪ Profesionalisme pegawai telah relative baik. Tetapi mind set pegawai masih “belum kreatif”. ▪ Profesionalisme – sudah bagus – pola pikir yang belum tergali – bagaimana mengoptimalkan SDM yang sudah ada ? ▪ SDM Integritas dan kreasi kurang
Kesejahteraan Pegawai	▪ Pendapatan pegawai tinggi – pasti akan baik – perlu penataan – kesejahteraan pegawai – reform pendapatan ▪ Perlu pengembangan pegawai – sekolah menjadi S2,

Sumber : Diskusi Kelompok Terfokus Kabupaten Muara Enim tanggal 26 Oktober 2011

Selain identifikasi masalah berdasarkan hasil diskusi, dilakukan pula analisis terhadap data skunder terkait dengan kondisi sumber daya aparatur Kabupaten Muara Enim.

Berdasarkan diagram 1 menunjukan bahwa sebagian besar pegawai memiliki pendidikan Diploma dan SLTA. Hal ini berarti, pelayanan masyarakat telah didukung oleh tenaga terampil.

Sebagai sebuah *public service institution*, Kabupaten Muara Enim pada dasarnya lebih banyak membutuhkan tenaga terampil yang menggerakkan fungsi-fungsi sesuai mandat formal yang dimiliki Kabupaten Muara Enim. Tenaga terampil yang dibutuhkan baik secara relevansi *directness* dan *immediateness* dengan tupoksi Kabupaten Muara Enim maupun kebutuhan dukungan (*supporting*) untuk menggerakkan organisasi secara sistem adalah tenaga fungsional guru, tenaga fungsional kesehatan, tenaga fungsional bidang pekerjaan umum, tenaga fungsional penyuluh, tenaga fungsional perencana, tenaga fungsional analis kepegawaian, pustakawan, tenaga fungsional pranata humas, dan tenaga fungsional auditor.

Dengan teridentifikasinya permasalahan Sumber Daya Aparatur pada Kabupaten Muara Enim, maka dalam rangka reformasi birokrasi Kabupaten Muara Enim, diperlukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Identifikasi kompetensi untuk rekrutmen pegawai baru (rekrutmen PNS, rekrutmen PNS dalam Jabatan Struktural, dan rekrutmen jabatan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan)
- b. Menyusun metode rekrutmen pegawai yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menjamin adanya netralitas dalam proses rekrutmen

- c. Menyusun data base pegawai sebagai sarana yang memudahkan dalam penentuan / seleksi pejabat struktural
- d. Menyusun peraturan mengenai disiplin dan pengukuran kinerja pegawai untuk dijadikan dasar pelaksanaan remunerasi
- e. Menyusun *job-grade* dengan terlebih dahulu melakukan analisis jabatan yang menghasilkan informasi jabatan dan evaluasi jabatan
- f. Melakukan kajian kebutuhan diklat pegawai dan melaksanakan diklat sesuai dengan ketrampilan yang diperlukan
- g. Mendorong perekrutan jabatan fungsional untuk posisi teknis tertentu

Dengan upaya tersebut diharapkan dapat memperoleh bekal pelaksanaan reformasi kelembagaan perangkat daerah berupa:

- a. Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang standar kompetensi untuk setiap jabatan pegawai, jabatan struktural, dan jabatan fungsional sebagai dasar penentuan/penseleksian calon pegawai negeri sipil, pejabat struktural, dan pejabat fungsional
- b. Tersusunnya Raperbup tentang tata cara rekrutmen pegawai
- c. Tersusunnya data base pegawai sebagai sarana yang memudahkan dalam penentuan / seleksi pejabat struktural
- d. Tersusunnya Raperbup tentang disiplin pegawai dan Evaluasi kinerja pegawai untuk kemudian dijadikan dasar pelaksanaan remunerasi
- e. Tersusunnya informasi jabatan, evaluasi jabatan dan *jobgrade*
- f. Terumuskannya kebutuhan diklat pegawai dan rencana (program, kegiatan, anggaran) diklat pegawai sesuai dengan ketrampilan yang diperlukan
- g. Terakomodasinya jabatan fungsional untuk posisi teknis tertentu yang sesuai

Area Perubahan Bidang Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu unsur dari fungsi manajemen. Kegiatan evaluasi dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdiri atas :

- a. Pengawasan Melekat (Waskat)
- b. Pengawasan berdasar pada sistem pengendalian instansi pemerintah.

- c. Pengawasan Fungsional (Wasfung)
- d. Pengawasan Legislatif
- e. Pengawasan Masyarakat

Pengawasan melekat merupakan pengawasan yang melekat dan sistem/pengendalian intern dimana unsur-unsur dalam pengawasan melekat ada 8 (delapan) unsur, yaitu : Pengorganisasian, Kebijakan, Perencanaan, Prosedur, Pencatatan, Pelaporan, Personil, Supervisi dan Review Intern.

Pengawasan berdasar pada pengendalian sistem internal pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1 adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas:

- tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,
- keandalan pelaporan keuangan,
- pengamanan aset negara, dan
- ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2)

Dasar hukum SPIP adalah UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pengawasan Fungsional merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga/Badan/Unit yang mempunyai tugas di bidang pengawasan dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian. Pengawasan Fungsional terdiri atas Pengawasan Internal dan eksternal pemerintah. Pengawasan Fungsional Internal Pemerintah adalah pengawasan fungsional yang dilakukan oleh BPKP, Inspektorat Jendral Departemen/Kementrian, Inspektorat

Provinsi serta Inspektorat Kabupaten/Kota. Pengawasan Fungsional Eksternal Pemerintah adalah pengawasan fungsional yang dilakukan oleh BPK dan KAP

Pengawasan Legislatif merupakan pengawasan yang dilakukan oleh DPR/DPRD terhadap Pemerintah/Pemerintah Daerah, bersifat pengawasan kebijakan dan bukan berupa pengawasan teknis. Pengawasan Legislatif dilakukan melalui :

- Pemandangan umum fraksi/fraksi dalam rapat paripurna DPR/DPRD.
- Rapat pembahasan dalam sidang komisi.
- Rapat pembahasan dalam panitia-panitia yang dibentuk berdasarkan tata tertib DPR/DPRD.
- Rapat dengar pendapat dengan Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pengawasan Masyarakat merupakan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai sosial kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengawasan masyarakat diperlukan dalam mewujudkan peran serta masyarakat guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Penanganan pengaduan masyarakat berdasarkan jenjang kewenangan dan tanggung jawab dengan memperhatikan muatan masalah serta objek terlapor. Pengawasan Masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui pemberian informasi, penyampaian pendapat serta saran.

Sehubungan dengan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Inspektorat Kabupaten Muara Enim yang mempunyai tugas dibidang pengawasan, melakukan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan, pengujian, pengusutan, penilaian monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim (APBD). Pelaksanaan tugas dimaksud diimplementasikan dalam Keputusan Bupati Muara Enim tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Sasaran dilaksanakan pengawasan sebagai berikut: menurunnya jumlah kasus yang merugikan keuangan negara/daerah; meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparat Inspektorat Kabupaten Muara Enim; dan meningkatnya disiplin pengawasan pegawai Inspektorat Kabupaten Muara Enim

Dengan teridentifikasinya berbagai permasalahan pengawasan pada Kabupaten Muara Enim, maka dalam rangka reformasi birokrasi Kabupaten Muara Enim, diperlukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Penerapan system pengawasan instansi pemerintah (SPIP) di lingkungan Kabupaten Muara Enim.
- b. Peningkatan Koordinasi rencana pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang responsif dengan tetap mengedepankan prinsip pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam teknis pengawasan melalui pengikutsertaan dalam diklat-diklat teknis yang diselenggarakan oleh instansi teknis terkait.
- d. Perbaikan tata kelola keuangan organisasi dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, kedisiplinan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
- e. Mengupayakan ketersediaan serta kecukupan sarana dan prasarana kantor baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
- f. Peningkatan koordinasi internal dengan unit-unit kerja yang ada di Inspektorat Kabupaten Muara Enim.

Dengan upaya tersebut diharapkan dapat memperoleh bekal pelaksanaan reformasi area pengawasan Kabupaten Muara Enim berupa:

- a. Terlaksananya SPIP di lingkungan Kabupaten Muara Enim
- b. Terselenggaranya Koordinasi rencana pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang responsif dengan tetap mengedepankan prinsip pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tersusunnya kompetensi sumber daya manusia dalam teknis pengawasan melalui pengikutsertaan dalam diklat-diklat teknis yang diselenggarakan oleh instansi teknis terkait.
- d. Terwujudnya perbaikan tata kelola keuangan organisasi dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, kedisiplinan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
- e. Tersedianya serta kecukupan sarana dan prasarana kantor baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
- f. Terwujudnya koordinasi internal dengan unit-unit kerja yang ada di Inspektorat Kabupaten Muara Enim.

Area Perubahan Bidang Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan tanggung gugat institusi pemerintah terhadap apa yang dilakukannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Akuntabilitas suatu organisasi tersebut dapat diketahui antara lain melalui laporan kinerja yang disebut dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selama waktu tertentu. Selain LAKIP terdapat pula Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Muara Enim.

- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Muara Enim

Akuntabilitas ini dilakukan untuk memenuhi kewajiban konstitusional bupati sesuai dengan amanat Pasal 31, 32 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 25, 27 dan 184 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 101, 102 dan 103 Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan serta Bab III PP No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Muara Enim.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah masih dihadapi permasalahan masih belum optimalnya kapasitas sumber daya aparatur dalam mengelola/memanajemen kegiatan dan administrasi keuangan. Sehingga perlu peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pada bidang tersebut.

Perlu diingat bahwa laporan-laporan tersebut hanya merupakan sarana untuk mengukur akuntabilitas instansi pemerintah, sedangkan yang menentukan akuntabilitas organisasi pemerintah utamanya lebih menekankan dan menentukan

kinerja yang sesuai dengan kebutuhan publik dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya, dan tugas fungsi SKPD pada umumnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menyusun Indikator Kinerja Utama dengan merujuk pada performance based management, dan peningkatan partisipasi masyarakat sebagai pihak yang dilayani, yang menentukan kegiatan pemerintah yang diprioritaskan. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan program dapat dilakukan dengan membuka akses publik terhadap layanan pemerintah secara elektronik, sehingga masyarakat mudah memberikan masukan dan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Untuk itu dalam menguatkan akuntabilitas Kabupaten Muara Enim perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyusun Indikator Kinerja Utama setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (instansi) di Kabupaten Muara Enim
- b. Menyusun sistem yang memudahkan masyarakat mengakses kebijakan dan pelaksanaan kebijakan

Dengan upaya tersebut, diharapkan dapat menghasilkan :

- a. Rancangan Keputusan Kepala SKPD tentang Indikator Kinerja Utama setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (instansi) di Kabupaten Muara Enim yang dapat dipergunakan untuk dijadikan dasar pengukuran kinerja instansi di Kabupaten Muara Enim
- b. Terbentuknya sistem yang memudahkan masyarakat mengakses kebijakan dan pelaksanaan kebijakan
- c. Rancangan (program, kegiatan, anggaran) peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan.

Area Perubahan Bidang Pelayanan Publik

Pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan 26 urusan wajib yang dilaksanakan oleh 52 SKPD dan 8 urusan pilihan yang dilaksanakan oleh 9 SKPD. Pelayanan Publik pada urusan wajib meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, kependudukan dan catatan sipil, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, koperasi dan UKM, dll. Pelayanan urusan pilihan antara lain pertanian, kehutanan, energy dan sumber daya mineral, dll.

Secara umum, pelayanan publik dalam berbagai sektor masih belum optimal yang disebabkan permasalahan antara lain :

Tabel 7: Permasalahan Pelayanan Publik di Kabupaten Muara Enim

Permasalahan	Pendapat dan/atau Saran atas Masalah
Belum ada standar pelayanan publik	Pelayanan publik belum ditetapkan dengan peraturan standar pelayanan publik.
Belum semua SKPD memiliki standar pelayanan public (SPP)	Banyak SKPD yang belum memiliki SPP Pelayanan publik belum mengacu pada SPM
Kantor Perijinan masih sebagai kantor pendapatan daerah	Kantor perijinan masih dianggap sebagai SKPD yang menghasilkan pendapatan daerah.

Sumber : Diskusi Kelompok Terfokus Kabupaten Muara Enim tanggal 26 Oktober 2011

Dengan teridentifikasinya berbagai pelayanan publik pada Kabupaten Muara Enim, maka dalam rangka reformasi birokrasi Kabupaten Muara Enim, diperlukan upaya-upaya sebagai berikut :

- Pembuatan peraturan standar pelayanan publik di Kabupaten Muara Enim
- Peningkatan pelayanan publik dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal
- Perubahan paradigma kantor perijinan sebagai ujung tombak pelayanan

Sehingga perlu dilakukan hal sebagai berikut :

- Tersusunnya dan ditetapkannya peraturan standar pelayanan publik di Kabupaten Muara Enim
- Terwujudnya pelayanan publik dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal
- Terwujudnya paradigma kantor perijinan sebagai ujung tombak pelayanan

Area Perubahan Pola Pikir (*Mind Set*) dan Budaya Kerja (*Culture Set*) Aparatur

Mind set lama aparatur yakni "dilayani publik" dan "kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah". Kondisi tersebut telah menciptakan ketidakpuasan terhadap pelayanan

publik yang dihasilkan pemerintah. Sehingga, kondisi tersebut telah melekat dalam benak dan pikiran masyarakat. Era reformasi birokrasi menuntut setiap penyelenggara pelayanan publik termasuk pemerintah mengubah mindset tersebut menjadi “melayani publik” dan “kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit”. Dengan demikian, pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan publik secara excellent. Untuk menciptakan hal tersebut, PNS di haruskan memiliki kemauan secara aktif membaca aturan, bersikap proaktif dan memberikan layanan yang cepat, murah dan ramah kepada masyarakat. Dengan demikian akan terwujud good governance dan meningkatkan daya saing global. Selain professional, PNS juga diwajibkan memiliki keseimbangan moralitas dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai aparatur negara maupun sebagai abdi masyarakat dalam memberikan pelayanan excellent. Untuk itu agenda reformasi birokrasi telah memfokuskan pada perubahan SDM sesuai dengan mindset PNS.

Hasil identifikasi permasalahan mindset PNS di Kabupaten Muara Enim seperti tabel dibawah ini :

Tabel 8: Permasalahan Mindset di Pemerintah Kabupaten Muara Enim

Permasalahan	Pendapat dan/atau Saran atas Masalah
Sulit merubah mindset	• Pola pikir menyelenggarakan kegiatan masih menggunakan “pola proyek”. Sehingga birokrasi disimpangkan untuk memperoleh keuntungan pribadi. • Sosialisasi RB belum efektif, sehingga belum mengetahui arah RB dan belum dapat menentukan QW.

Sumber : Diskusi Kelompok Terfokus Kabupaten Muara Enim tanggal 26 Oktober 2011

Dengan teridentifikasinya berbagai mindset pada Kabupaten Muara Enim, maka dalam rangka reformasi birokrasi Kabupaten Muara Enim, diperlukan upaya-upaya sebagai berikut :

- Peningkatan pemahaman tentang hakikat pelayan publik.
- Peningkatan pemahaman tentang arah, tujuan dari program RB.

Dengan upaya tersebut diharapkan dapat memperoleh bekal pelaksanaan reformasi mindset perangkat daerah berupa:

- Tersosialisasinya pemahaman hakikat pelayan publik
- Tersosialisasinya pemahaman tentang arah, tujuan dari program RB

II. TUJUAN REFORMASI BIROKRASI

Reformasi yang dilakukan harus mencakup semua aspek-aspek utama organisasi, dengan fokus utama pada pencapaian tujuan terkait dengan pertanyaan kondisi seperti apa yang ingin dicapai di masa mendatang.

Adapun tujuan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Muara Enim adalah :

1. Terwujudnya pencapaian arah dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita sesuai dengan visi, misi dan arah yang telah disepakati bersama;
2. Terwujudnya model manajemen pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan menekankan pada efisiensi, efektivitas dan keadilan;
3. Terwujudnya sosok aparatur negara yang profesional, bersih dari praktek KKN, dan berintegritas tinggi sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan aparatur negara yang kompeten dalam sebuah sistem yang terintegrasi dan tersentralisasi;
4. Tersedianya ruang bagi para *stakeholders* untuk mendapatkan pelayanan publik yang prima melalui perkonsultasian dan advokasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tepat dan bermanfaat;
5. Terselenggaranya Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Excellence.

Dengan tercapainya tujuan reformasi Kabupaten Muara Enim, maka diharapkan Kabupaten Muara Enim mampu berkontribusi secara nyata terhadap upaya penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

III. SASARAN REFORMASI BIROKRASI

Untuk dapat mewujudkan tujuan reformasi Kabupaten Muara Enim, maka harus dilakukan berbagai perubahan spesifik yang merupakan sasaran. Sasaran yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- (1) Penguatan sistem perencanaan kegiatan pembangunan daerah dengan memperhatikan kemanfaatan guna tersedianya masukan baik berupa perumusan maupun rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang handal sesuai dengan arah kebijakan reformasi birokrasi; Peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya aparatur daerah melalui berbagai program pengembangan pegawai; serta penguatan manajemen pembangunan daerah yang

mampu mengarahkan pemanfaatan sumberdaya secara efisien dan efektif, dan proses yang mempertimbangkan nilai-nilai akademik dan kemanfaatan.

- (2) Peningkatan mutu hasil pembangunan daerah dengan mengedepankan uji sah atas berbagai model manajemen pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan menekankan pada efisiensi, efektivitas dan keadilan; serta penguatan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil pembangunan daerah melalui memanfaatkan berbagai media yang tepat;
- (3) Penataan Peraturan Kabupaten Muara Enim yang meliputi identifikasi dan sinkronisasi per-uu-an; Penataan dan Penguatan Organisasi yang meliputi pemetaan tugas dan fungsi unit kerja, dan penguatan unit kerja yang menangani organisasi, tatalaksana, kepegawaian, dan pelayanan publik; Penataan tatalaksana yang meliputi penyusunan SOP dan e-government; Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur yang meliputi perbaikan sistem rekrutmen, penyusunan uraian jabatan, peringkat jabatan, standar kompetensi jabatan, profile kompetensi pegawai, indikator kinerja, pemutakhiran data pegawai, dan penyelenggaraan diklat pegawai berbasis kompetensi; Penguatan Pengawasan yang meliputi peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, peningkatan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan; penguatan Akuntabilitas Kinerja yang meliputi peningkatan kualitas LAKIP, pengembangan sistem kinerja, tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU), Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang meliputi penerapan Standar Pelayanan Publik (SPP) di setiap unit kerja, dan peningkatan partisipasi masyarakat; Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi yang tepat waktu dan bermanfaat.
- (4) Peningkatan dan percepatan pelayanan publik melalui Quick Wins yang meliputi: Perbaikan pelayanan melalui penerapan e-services perijinan.

IV. PRIORITAS DAN AGENDA/ WAKTU

PROGRAM QUICK WINS		KERANGKA WAKTU 2014	KET.
1.	E-service Bidang Pelayanan Dasar	•	
2.	E-Service Bidang Perizinan	•	
3.	E-Service Bidang Pelayanan lainnya	•	

PROGRAM QUICK WINS		KERANGKA WAKTU 2014	KET.
4.	E-Procurement	•	Transparansi pengadaan barang dan jasa

PROGRAM QUICK WINS	KERANGKA WAKTU 2014-2018					KETERANGAN
	2014	2015	2016	2017	2018	
REFORMASI MANAJEMEN PERUBAHAN						
1. Pembentukan Tim Manajemen Perubahan	•					Tim Manajemen Perubahan
2. Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi	•					Strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi
3. Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam rangka RB						Terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi, serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pada seluruh tingkatan pegawai
REFORMASI MANAJEMEN PERUBAHAN						
4. Penataan berbagai Per-UU-an yang dikeluarkan /diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Muara enim		•	•	•	•	Identifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan / diterbitkan sebagai dasar regulasi dan deregulasi
REFORMASI MANAJEMEN PERUBAHAN						

KETERANGAN	TAKSIKUM KEMERDEKAAN					KETERANGAN
	2014	2015	2016	2017	2018	
5. Restrukturisasi / Penataan tugas unit kerja di Kabupaten Muara Enim		•	•			Peta Tugas dan Fungsi Unit Kerja di Kabupaten Muara Enim yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)
6. Penguatan Unit Organisasi yang secara fungsional melaksanakan fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan diklat.			•	•	•	Unit Organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan diklat mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran RB.
PENGUKURAN PENINGKATAN KEMERDEKAAN						
7. Penyusunan Dokumen SOP Penyelenggara tugas dan fungsi yang disahkan			•	•	•	Dokumen SOP Penyelenggara tugas dan fungsi yang disahkan
8. Pembangunan / pengembangan e-office / e-government di Kabupaten Muara Enim			•	•	•	Tersedianya e-office / e-government di Kabupaten Muara Enim
PENGUKURAN PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER MANUSIA						
9. Penataan Sistem Rekrutmen pegawai		•	•	•	•	Sistem Rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi
10. Analisis Jabatan		•	•	•	•	Dokumen Peta dan Uraian Jabatan untuk seluruh posisi / pekerjaan dalam struktur organisasi
11. Evaluasi Jabatan		•	•	•	•	Peringkat dan Harga Jabatan

PILIHAN 2018	KINERJA 2018					KETERANGAN
	2014	2015	2016	2017	2018	
12. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan		•	•	•	•	Dokumen Standar Kompetensi Jabatan
13. Assesment individu berdasarkan kompetensi		•	•	•	•	Peta Profil Kompetensi Individu
14. Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu		•	•	•	•	Indikator Kinerja Individu yang terukur
15. Pembangunan / pengembangan data base pegawai		•	•	•	•	Ketersediaan Data Pegawai yang mutakhir dan akurat
16. Pengembangan Diklat Pegawai berbasis Kompetensi		•	•	•	•	Sistem Diklat Pegawai berbasis Kompetensi
Peningkatan Kinerja dan Kualitas Kerja						
17. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		•	•	•	•	Peningkatan ketaatan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi.
18. Peningkatan Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting		•	•	•	•	Peningkatan Kinerja dan Kualitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara
Peningkatan Kualitas Akutansi Pemerintah						
19. Penguatan AKIP		•	•	•	•	Peningkatan Kualitas AKIP
20. Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi		•	•	•	•	Sistem yang mendorong pencapaian kinerja organisasi yang terukur

KETERANGAN	KETERANGAN TAHUN					KETERANGAN
	2014	2015	2016	2017	2018	
21. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)		•	•	•	•	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Muara Enim
REKAM JEKAL RENCANA KEBANGSAHAN 2015-2019						
22. Penerapan Standar Pelayanan di setiap unit kerja		•	•	•	•	peningkatan kualitas pelayanan publik
REKAM JEKAL RENCANA KEBANGSAHAN 2015-2019						
23. Monitoring		•	•	•	•	Laporan Monitoring
24. Evaluasi Tahunan		•	•	•	•	Laporan Evaluasi Tahunan
25. Evaluasi menyeluruh (semester kedua tahun 2014)					•	Laporan Evaluasi Lima Tahunan

V. TENAGA PELAKSANA

Tenaga pelaksana reformasi birokrasi di Kabupaten Muara Enim terdiri dari : Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tim Pendukung, yang terdiri dari :Tim Satgas dan Kelompok Kerja (Pokja), serta unit-unit kerja. Adapun mekanisme kerja tim reformasi birokrasi dapat digambarkan sebagai berikut :

SOP Penyusunan dan Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kabupaten Muara Enim

No	Kegiatan	Tenaga					Durasi			Catatan
		Wakil Bupati	Wakil Kepala Dinas	Tim Pelaksana	Tim Pendukung	Tim Pengarah	Waktu	Tempat	Output	
1	Penyusunan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kabupaten Muara Enim						10 hari	Kantor Bupati	Dokumen Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kabupaten Muara Enim	
2	Penyusunan Tim Pendukung Reformasi Birokrasi Kabupaten Muara Enim						10 hari	Kantor Bupati	Dokumen Tim Pendukung Reformasi Birokrasi Kabupaten Muara Enim	
3	Penyusunan Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kabupaten Muara Enim						10 hari	Kantor Bupati	Dokumen Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kabupaten Muara Enim	
4	Penyusunan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kabupaten Muara Enim						10 hari	Kantor Bupati	Dokumen Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kabupaten Muara Enim	
5	Penyusunan Tim Pendukung Reformasi Birokrasi Kabupaten Muara Enim						10 hari	Kantor Bupati	Dokumen Tim Pendukung Reformasi Birokrasi Kabupaten Muara Enim	
6	Penyusunan Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kabupaten Muara Enim						10 hari	Kantor Bupati	Dokumen Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kabupaten Muara Enim	
7	Penyusunan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kabupaten Muara Enim						10 hari	Kantor Bupati	Dokumen Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kabupaten Muara Enim	
8	Penyusunan Tim Pendukung Reformasi Birokrasi Kabupaten Muara Enim						10 hari	Kantor Bupati	Dokumen Tim Pendukung Reformasi Birokrasi Kabupaten Muara Enim	
9	Penyusunan Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kabupaten Muara Enim						10 hari	Kantor Bupati	Dokumen Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kabupaten Muara Enim	
10	Penyusunan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kabupaten Muara Enim						10 hari	Kantor Bupati	Dokumen Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kabupaten Muara Enim	
11	Penyusunan Tim Pendukung Reformasi Birokrasi Kabupaten Muara Enim						10 hari	Kantor Bupati	Dokumen Tim Pendukung Reformasi Birokrasi Kabupaten Muara Enim	
12	Penyusunan Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kabupaten Muara Enim						10 hari	Kantor Bupati	Dokumen Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kabupaten Muara Enim	

VI. ANGGARAN

No.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI	KEBUTUHAN ANGGARAN					JUMLAH
		2019	2020	2021	2022	2023	
QUICK WINS							
1.	E-Service Bidang						
2.	E-Service Bidang						
Jumlah Kebutuhan Program Quick Wins							
1.	Pembentukan Tim Manajemen Perubahan						
2.	Penyusunan Strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi						
3.	Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam rangka RB						
Jumlah Kebutuhan Anggaran Program Manajemen Perubahan							
1.	Penataan berbagai Per-UU- an yang dikeluarkan /diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Muara enim						
Jumlah Kebutuhan Anggaran Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan							
1.	Restrukturisasi / Penataan tugas unit kerja di Kabupaten Muara Enim						
2.	Penguatan Unit Organisasi yang secara fungsional melaksanakan fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan diklat.						
Jumlah Kebutuhan Anggaran Program Penataan dan Penguatan Organisasi							
	Penyusunan Dokumen SOP Penyelenggara tugas dan						

No.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI	KEBUTUHAN ANGGARAN					JUMLAH
		2016	2017	2018	2019	2020	
	fungsi yang disahkan						
	Pembangunan / pengembangan e-office / e- government di Kabupaten Muara Enim						
Jumlah Kebutuhan Anggaran Program Penataan Tatalaksana							
Program Penataan Sistem Manajemen SDM							
1.	Penataan Sistem Rekrutmen pegawai						
2.	Analisis Jabatan						
3.	Evaluasi Jabatan						
4.	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan						
5.	Assesment individu berdasarkan kompetensi						
6.	Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu						
7.	Pembangunan / pengembangan data base pegawai						
8.	Pengembangan Diklat Pegawai berbasis Kompetensi						
Jumlah Kebutuhan Anggaran Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur							
Program Penguatan Pengawasan							
1.	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)						
2.	Peningkatan Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting						
Jumlah Kebutuhan Anggaran Program Penataan Penguatan Pengawasan							
Program Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja							
1.	Penguatan AKIP						
2.	Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja						

No	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI	KEBUTUHAN ANGGARAN					JUMLAH
		2014	2015	2016	2017	2018	
	1. Optimalisasi						
3.	Pemertanmasi Indikator Kinerja Utama (IKU)						
Jumlah Kebutuhan Anggaran Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja							
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK							
1.	Penerapan Standar Pelayanan di setiap unit kerja						
Jumlah Kebutuhan Anggaran Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik							
PROGRAM MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN							
1.	Monitoring						
2.	Evaluasi Tahunan						
3.	Evaluasi menyeluruh (semester kedua tahun 2014)						
Jumlah Kebutuhan Anggaran Program Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan							

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Lampiran 2 : Peraturan Bupati Muara Enim
Nomor : 19 Tahun 2012
Tentang : Grand Design dan
Road Map Reformasi
Birokrasi Kabupaten
Muara Enim

1. QUICK WINS

NAMA PROGRAM : QUICK WINS (1)
NAMA KEGIATAN : SISTEM INFORMASI HUKUM SECARA ONLINE

NO	Uraian Tahapan	Tahun 2012												PIC	Keterangan
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
1.	Tahapan 1 Pembangunan dan Penataan Pelayanan Informasi perizinan													Sekretaris Daerah	Saat ini sudah memiliki Kantor Pelayanan terpadu satu pintu,
2.	Tahapan 2 Sosialisasi dan Implementasi													idem	
3.	Tahapan 3 Pengukuran Dampak/ Perubahan													Idem	

Keterangan:

1. Uraian kegiatan pada masing-masing tahapan dapat dilihat pada poin a. Rencana Kerja Rinci
2. Setiap triwulan pelaksanaan program dan kegiatan dibagi dalam 3 bagian dan satu bagian mewakili pelaksanaan selama 1 bulan

NAMA PROGRAM : QUICK WINS (2)

NAMA KEGIATAN : PELAYANAN INFORMASI PERIZINAN PELAYANAN DASAR SECARA ONLINE

No	Uraian Tahapan	Tahun 2013												PIC	Keterangan
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
1.	Tahapan 1 Pengembangan dan Penataan Pelaksanaan Informasi perizinan													Sekretaris Daerah	
2.	Tahapan 2 Sosialisasi dan Implementasi													Idem	
3.	Tahapan 3 Pengukuran Dampak/ Perubahan													Idem	

Keterangan:

1. Uraian kegiatan pada masing-masing tahapan dapat dilihat pada poin a. Rencana Kerja Rinci
2. Setiap triwulan pelaksanaan program dan kegiatan dibagi dalam 3 bagian dan satu bagian mewakili pelaksanaan selama 1 bulan

PROGRAM : QUICK WINS (3)
NAMA KEGIATAN : KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK LAINNYA MUARA ENIM BERBASIS INTERNET

No	Uraian Tahapan	Tahun 2012												PIC	Keterangan
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Tahapan 1 Identifikasi Jenis Layanan dan Pemetaan Kemampuan Website Muara Enim													Sekretaris Daerah	
2.	Tahapan 2 Sosialisasi dan Implementasi													idem	
3.	Tahapan 3 Pengukuran Dampak/ Perubahan													Idem	

Keterangan :

1. Uraian kegiatan pada masing-masing tahapan dapat dilihat pada poin a. Rencana Kerja Rinci
2. Setiap triwulan pelaksanaan program dan kegiatan dibagi dalam 3 bagian dan satu bagian mewakili pelaksanaan selama 1 bulan

2. PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN

NAMA PROGRAM : MANAJEMEN PERUBAHAN
 NAMA KEGIATAN : PENYUSUNAN STRATEGI MANAJEMEN PERUBAHAN DAN STRATEGI KOMUNIKASI

No	Uraian Tahapan	Tahun																PIC	Keterangan
		2012				2013				2014	2015	2016							
		1	2	3	4	1	2	3	4										
1.	Tahapan 1 Penyusunan draft dokumen strategi manajemen perubahan																	Tim Pokja 01	
2.	Tahapan 2 Pengembangan draft dokumen manajemen perubahan																	idem	
3.	Tahapan 3 Penetapan Dokumen Strategi Manajemen Perubahan																	Sekda	

Keterangan:

- uraian kegiatan pada masing-masing tahapan dapat dilihat pada poin a. Rencana Kerja Rinci
- Setiap tahun pelaksanaan program dan kegiatan dibagi dalam 4 bagian dan satu bagian mewakili pelaksanaan selama 3 bulan

NAMA PROGRAM : MANAJEMEN PERUBAHAN
NAMA KEGIATAN : SOSIALISASI DAN INTERNALISASI MANAJEMEN PERUBAHAN

No	Uraian Tahapan	TAHUN																				Keterangan		
		2012				2013				2014				2015				2016					PIC	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1	Tahapan 1 Persiapan																						Tim Pokja 01	
2	Tahapan 2 Sosialisasi dan Internalisasi																						idem	
3	Tahapan 3 Pengukuran Dampak/ Perubahan																						idem	

Keterangan:

1. uraian kegiatan pada masing-masing tahapan dapat dilihat pada poin a. Rencana Kerja Rinci
2. Setiap tahun pelaksanaan program dan kegiatan dibagi dalam 4 bagian dan satu bagian mewakili pelaksanaan selama 3 bulan

3. PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

NAMA PROGRAM : PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 NAMA KEGIATAN : IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NO	Uraian Tahapan	TAHUN																				PIC	Keterangan	
		2012				2013				2014				2015				2016						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1.	Membuat daftar keputusan/ peraturan yang telah ditetapkan yang di dalamnya berisi uraian singkat mengenai materi muatan yang diatur dalam keputusan/ peraturan tersebut																						Tim Pokja 01	
	Mengelompokkan peraturan/ keputusan dalam kelompok regeling dan beschikking. Pada tahapan ini hanya keputusan/ peraturan yang bersifat regeling yang akan dijadikan obyek identifikasi. Langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut : 1) Melakukan telaahan terhadap peraturan/ keputusan yang telah diinventarisir; 2) Menentukan dan memisahkan antara keputusan/ peraturan yang																						idem	

NO	Uraian Tahapan	TAHUN																PIC	Keterangan					
		2012				2013				2014				2015						2016				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			1	2	3	4	
	Bersifat regeling dan beschikking : 3) Menyusun daftar peraturan/ keputusan yang bersifat mengatur																						Tim Pokja 01	
	Review dan evaluasi substantif dan format terhadap peraturan yang bersifat regeling sesuai dengan ketentuan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan untuk mengetahui berbagai kelemahan aturan yang diantaranya dengan melihat kejelasan tujuan, kejelasan rumusan, kedaygunaan, kehasilgunaan, dan harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi/ sederajat. Langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut : 1) Melakukan review dan analisa																						Idem	

4. PROGRAM PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

NAMA PROGRAM : PENGUATAN DAN PENATAAN ORGANISASI
 NAMA KEGIATAN : RESTRUKTURISASI/PENATAAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA DI KABUPATEN MUARA ENIM

NO	Uraian Tahapan	TAHUN																				PIC	Keterangan	
		2012				2013				2014				2015				2016						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1.	Tahap 1. Penataan struktur, tugas dan fungsi unit kerja																							
2.	Tahap 2 Penetapan rancangan struktur organisasi Bupati yang baru																							
3.	Tahap 3. Pengukuran Dampak/ Perubahan																							

Keterangan:

- uraian kegiatan pada masing-masing tahapan dapat dilihat pada poin a. Rencana Kerja Rinci
- Setiap tahun pelaksanaan program dan kegiatan dibagi dalam 4 bagian dan satu bagian mewakili pelaksanaan selama 3 bulan.

NAMA PROGRAM : Penguatan dan Penataan Organisasi
NAMA KEGIATAN : Penguatan Unit Kerja yang Berkaitan dengan Organisasi Tatalaksana, Pelayanan Publik, Kepegawaian, dan Diklat

NO	Uraian Tahapan	TAHUN																				PIC	Keterangan	
		2012				2013				2014				2015				2016						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1.	Tahapan 1. Persiapan																						Tim Pokja 01	
2.	Tahapan 2 Pelaksanaan																						idem	
3.	Tahapan 3. Evaluasi dan Monitoring																							

Keterangan:

1. Uraian kegiatan pada masing-masing tahapan dapat dilihat pada poin a. Rencana Kerja Rinci
2. Setiap tahun pelaksanaan program dan kegiatan dibagi dalam 4 bagian dan satu bagian mewakili pelaksanaan selama 3 bulan.

5. PROGRAM PROGRAM PENATAAN TATALAKSANA

NAMA PROGRAM : PENATAAN TATA LAKSANA

NAMA KEGIATAN : PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELENGGARAAN
TUGAS DAN FUNGSI

NO	Uraian Tahapan	TAHUN																				PIC	Keterangan	
		2012				2013				2014				2015				2016						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
A.	Tahap 1. Pengembangan/ pembenahan Sistem																							
1.	Inventarisasi kebutuhan SOP berdasarkan Tugas dan Fungsi yang dimiliki Kabupaten Muara Enim																						Tim Pokja 01	
2.	Inventarisasi dan pemetaan SOP yang ada dan SOP yang dibutuhkan Muara Enim																						idem	
3.	Penyusunan Instrumen Pengembangan (Penyusunan, Perbaikan dan Penyempurnaan) SOP Muara Enim																							
4.	Penyusunan Rencana dan strategi Pengembangan SOP Muara Enim																							

NO	Uraian Tahapan	TAHUN																				PIC	Keterangan	
		2012				2013				2014				2015				2016						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
5.	Konsolidasi dan Implementasi Rencana dan Strategi Pengembangan SOP Muara Enim																						Tim Pokja 01	
6.	Pengembangan SOP Muara Enim																						idem	
7.	Review dan Integrasi draft dokumen SOP Muara Enim																							
8.	Finalisasi Dokumentasi Draft Akhir SOP Muara Enim																							
9.	Penetapan Dokumen SOP Muara Enim																							
B. Tahap 2. Internalisasi, Sosialisasi, Implementasi dan Pengembangan SOP																								
1.	Internalisasi Dokumen SOP Muara Enim kepada seluruh pegawai																							
2.	Sosialisasi Dokumen SOP kepada stakeholders Muara Enim																							

NO	Uraian Tahapan	TAHUN																				PIC	Keterangan	
		2012				2013				2014				2015				2016						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
3.	Implementasi SOP Muara Enim pada penyelenggaraan tugas dan fungsi																							
4.	Pengembangan SOP Muara Enim sesuai dengan dinamika tugas dan fungsi yang ada																							Tim Pokja 01
C. Tahap 3. Pengukuran Dampak/ Perubahan																								
5.	Melakukan pemantauan (monitoring) terhadap implementasi dan pengembangan SOP Muara Enim																							
6.	Mengevaluasi dan menilai dampak dari implementasi dan pengembangan SOP terhadap pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai Muara Enim																							

Keterangan:

1. uraian kegiatan pada masing-masing tahapan dapat dilihat pada poin a. Rencana Kerja Rinci
2. Setiap tahun pelaksanaan program dan kegiatan dibagi dalam 4 bagian dan satu bagian mewakili pelaksanaan selama 3 bulan.

NAMA PROGRAM : PENATAAN TATA LAKSANA
NAMA KEGIATAN : PENYUSUNAN TATA LAKSANA (BUSSINESS PROCESS) YANG MENGHASILKAN E-GOVERNMENT MELALUI PENERAPAN E-OFFICE

NO	Uraian Tahapan	TAHUN																				PIC	Keterangan	
		2012				2013				2014				2015				2016						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1.	Evaluasi/ review Rencana Detail Pengembangan ICT Muara Enim																						Tim Pokja 01	
2.	Pembenahan sistem manajemen & Infrastruktur ICT																							
3.	Pembenahan Portal Website Muara Enim berikut sub domainnya																							
4.	Pembenahan Sistem Aplikasi Kearsipan tata persuratan Kearsipan																							
5.	Pembenahan sistem Aplikasi Kearsipan																							
6.	Pembenahan Sistem Aplikasi Gateway																							
7.	Pembenahan Muara Enim Intranet Sistem Informasi																							
8.	Pembenahan dan peningkatan ICT security																							

NO	Uraian Tahapan	TAHUN																				PIC	Keterangan			
		2012				2013				2014				2015				2016								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
	system																									
9.	Implementasi dan Sosialisasi website muara enim sebagai suatu																							Sekretaris Daerah		
10.	Web yang menampilkan informasi yang lengkap seputar kegiatan dan produk Muara Enim yang terintegrasi																									
11.	Implementasi dan Sosialisasi Sistem Aplikasi tata persurutan elektronik																								Sekretaris Daerah	
12.	Implementasi dan Sosialisasi Sistem Aplikasi Kearsipan																								Sekretaris Daerah	
13.	Pembenahan Sistem Aplikasi Aplikasi SMS Gateway																									
14.	Implementasi dan Sosialisasi Muara Enim Intranet Sistem Informasi																									
15.	Implementasi dan Sosialisasi ICT security systems																									
16.	Pemantauan pelaksanaan berbagai system aplikasi natam dan pendukung tersebut diatas																									

NO	Uraian Tahapan	TAHUN																				PIC	Keterangan	
		2012				2013				2014				2015				2016						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
17	Evaluasi/ penilaian atas dampak penerapan Sistem Aplikasi Utama dan pendukung tersebut terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan kinerja Muara Enim																							

6. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

NAMA PROGRAM : PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
 NAMA KEGIATAN : PENATAAN SISTEM REKRUTMEN PEGAWAI

NO	Uraian Tahapan	TAHUN																				PIC	Keterangan	
		2012				2013				2014				2015				2016						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1.	Tahap 1. Pengembangan/ Pembangunan Sistem Rekrutmen Pegawai																						Sekretaris Daerah	
2.	Tahap 2. Sosialisasi dan Implementasi Sistem Pengadaan Pegawai																						Sekretaris Daerah	
3.	Tahap 2. Pengukuran dampak/ Perubahan																						Sekretaris Daerah	

NAMA PROGRAM : PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
NAMA KEGIATAN : ANALISIS JABATAN

No	Uraian Tahapan	TAHUN																				PIC	Keterangan	
		2012				2013				2014				2015				2016						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1.	Tahap 1. Pembangunan/pembenahan analisis jabatan																						Sekretaris Daerah	
2.	Tahap 2. Sosialisasi hasil analisis jabatan kepada seluruh Pegawai																						Sekretaris Daerah	
3.	Tahap 3. Evaluasi penerapan hasil analisis jabatan																						Sekretaris Daerah	

NAMA PROGRAM : PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
NAMA KEGIATAN : EVALUASI JABATAN

No	Uraian/Tahapan	TAHUN																				PIC	Keterangan		
		2012				2013				2014				2015				2016							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1.	Tahap 1. Pembangunan/pembenahan sistem																						Sekretaris Daerah		
2.	Tahap 2. Sosialisasi dan implementasi sistem																							Sekretaris Daerah	
3.	Tahap 3. Pengukuran dampak/Perubahan																							Sekretaris Daerah	

NAMA PROGRAM : PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
NAMA KEGIATAN : PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN

No	Uraian Tahapan	TAHUN																				PIC	Keterangan		
		2012				2013				2014				2015				2016							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1.	Tahap 1: Penyusunan/pembenahan standar Kompetensi Jabatan																						Sekretaris Daerah		
2.	Tahap 2: Sosialisasi dan implementasi Standar Kompetensi Jabatan																							Sekretaris Daerah	
3.	Tahap 3: Pengukuran dampak/Perubahan																							Sekretaris Daerah	

NAMA PROGRAM : PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
NAMA KEGIATAN : ASSESMENT INDIVIDU BERDASARKAN KOMPETENSI

No	Uraian Tahapan	TAHUN																				PIC	Keterangan	
		2012				2013				2014				2015				2016						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1.	Tahap 1: Penyusunan Rencana Assesmen Individu berdasarkan kompetensi																						Sekretaris Daerah	
2.	Tahap 2: Melakukan assesmen terhadap seluruh pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kabupaten Muara Enim																						Sekretaris Daerah	
3.	Tahap 3: Menetapkan Hasil Assesmen pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kabupaten Muara Enim																						Sekretaris Daerah	

NAMA PROGRAM : PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
NAMA KEGIATAN : PENERAPAN SISTEM PENILAIAN KINERJA INDIVIDU

No	Uraian Tahapan	TAHUN																				PIC	Keterangan		
		2012				2013				2014				2015				2016							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1.	Tahap 1. Pembangunan/pembenahan sistem																						Sekretaris Daerah		
2.	Tahap 2. Sosialisasi dan implementasi sistem																							Sekretaris Daerah	
3.	Tahap 3. Pengukuran dampak/Perubahan																							Sekretaris Daerah	

NAMA PROGRAM : PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
NAMA KEGIATAN : PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN DATABASE PEGAWAI

No	Uraian Tahapan	TAHUN																				PIC	Keterangan		
		2012				2013				2014				2015				2016							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
4.	Tahap 1. Pembangunan/pembenahan sistem																						Sekretaris Daerah		
5.	Tahap 2. Sosialisasi dan implementasi sistem																							Sekretaris Daerah	
6.	Tahap 3. Pengukuran dampak/Perubahan																							Sekretaris Daerah	

NAMA PROGRAM : PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
NAMA KEGIATAN : PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERBASIS KOMPETENSI

No	Uraian Tahapan	TAHUN																				PIC	Keterangan		
		2012				2013				2014				2015				2016							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1.	Tahap 1: Pembangunan/pembenahan sistem																						Sekretaris Daerah		
2.	Tahap 2: Sosialisasi dan implementasi sistem																							Sekretaris Daerah	
3.	Tahap 3: Pengukuran dampak/Perubahan																							Sekretaris Daerah	

7. PROGRAM KEGIATAN PENGAWASAN

NAMA PROGRAM : Penguatan Pengawasan
NAMA KEGIATAN : Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kabupaten Muara Enim

No	Uraian Tahapan	TAHUN																				Keterangan
		2012				2013				2014				2015				2016				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Penahaman (knowing), Penyamaan Persepsi (mapping), <i>Norming</i> dan <i>forming</i> terhadap Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;																					
2.	Pemetaan dengan melihat kondisi SPIP yang terdapat di lingkungan Kabupaten Muara Enim untuk dilakukan <i>area of improvement</i> ;																					
3.	Membentuk Satuan Petugas (Satgas) SPIP di lingkungan Kabupaten Muara Enim mengacu kepada 5 unsur SPIP, yaitu: Lingkungan Pengendalian, Penilaian risiko, Kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern;																					

No	UraianTahapan	TAHUN																				Keterangan
		2012				2013				2014				2015				2016				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
4.	Memberikan pendidikan dan pelatihan Satgas yang telah dibentuk tersebut, sebagai bagian dari percepatan penyebaran pemahaman SPIP;																					
5.	Penyusunan petunjuk teknis penerapan SPIP di lingkungan Kabupaten Muara Enim;																					
6.	Sosialisasi Penerapan SPIP di lingkungan Kabupaten Muara Enim;																					
7.	Pelaksanaan dan penerapan SPIP;																					
8.	Inspektorat sebagai pembinan SPIP melakukan pengawasan dan bimbingan teknis terhadap penerapan SPIP di lingkungan Kabupaten Muara Enim;																					
9.	Melakukan pemantauan atas penerapan SPIP di lingkungan Kabupaten MuaraEnim;																					
10.	Mengevaluasi dan menilai dampak penerapan SPIP																					

NAMA PROGRAM : Penguatan Pengawasan
NAMA KEGIATAN : Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting

No	Uraian Tahapan	TAHUN																Keterangan				
		2012				2013				2014				2015					2016			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Penyusunan susunan, tugas dan tanggung jawab tim pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan pemerintah.																					
2.	Penyusunan Prosedur Pemeriksaan yang lebih diarahkan kepada penguatan. Penilaian efektivitas dan kecukupan sistem pengendalian manajemen yang dimiliki oleh setiap Satker yang ada di lingkungan Kabupaten Muara Enim;																					
3.	Pemeriksaan yang difokuskan dalam mengenali resiko-resiko yang mengancam pencapaian organisasi dengan meyakinkan proses bisnis yang dijalankan telah memenuhi tujuan yang ditetapkan;																					
4.	Pelaporan hasil pemeriksaan yang mengacu kepada prosedur mutu pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan																					

No	Uraian/Tahapan	TAHUN																Keterangan				
		2012				2013				2014				2015					2016			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
	Kabupaten MuaraEnim;																					
5.	Identifikasi perbaikan untuk memperbaiki proses, sarana, maupun SDM, yang bertujuan untuk peningkatan kinerja;																					
6.	Sosialisai regular Pedoman Pengawasan aparat pengawasan internal																					
7.	Masukan/input dalam rencana penerapan Pemeriksaan tahunan Inspektorat Kabupaten Muara Enim terhadap Satker-Satker di lingkungan Kabupaten Muara Enim																					
8.	Pelaksanaan pemeriksaan di lingkungan Kabupaten Muara Enim berdasarkan Pedoman Pengawasan Reguler terbaru																					
9.	Mengevaluasi dan menilai dampak dari Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>quality assurance</i> dan <i>consulting</i> terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kabupaten Muara Enim																					

8. PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

NAMA PROGRAM : PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

NAMA KEGIATAN : PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

No	Uraian Tahapan	TAHUN																				Keterangan
		2012				2013				2014				2015				2016				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Review petunjuk teknis yang dijadikan acuan dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;																					
2.	Penyusunan Pedoman evaluasi Pelaporan Akuntabilitas Kinerja yang berisi tentang petunjuk, proses, dan sistematisa serta mekanisme evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja yang disusun oleh unit kerja di lingkungan Kabupaten Muara Enim;																					
3.	Forum-forum rapat antara pimpinan dan staf, diklat-diklat pegawai iserta kegiatan internalisasikannya sesuai dengan tahapan kerja Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Muara Enim;																					
4.	Implementasi pedoman dilaksanakan setelah tahapan																					

No	Uraian Tahapan	TAHUN																Keterangan				
		2012				2013				2014				2015					2016			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
	sosialisasi dan internalisasi kesetiap unit kerja telah dilaksanakan secara efektif;																					
5.	Mengevaluasi progress atau kemajuan dari pelaksanaan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dari setiap unit kerja yang diwajibkan untuk menyusunnya apakah sudah sesuai dengan kriteria maupun norma serta standar yang telah ditetapkan;																					
6.	Mengevaluasi dampak yang ditimbulkan setelah diberlakukannya pedoman pelaporan akuntabilitas kinerja kepada keseluruhan proses dan output maupun <i>outcome</i> yang dihasilkan oleh setiap unit kerja yang diwajibkan menyusun laporan akuntabilitas kinerja tersebut.																					

9. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

NAMA PROGRAM : PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
 NAMA KEGIATAN : PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KABUPATEN MUARA ENIM

No	Uraian Tahapan	TAHUN																PIC	Keterangan
		2012				2013				2014	2015	2016							
		1	2	3	4	1	2	3	4										
A.	Tahap 1. Pengembangan /pembenahan Sistem																		
1	Tahapan 1 Identifikasi Unit Kerja di Lingkungan Kabupaten Muara Enim yang menyelenggarakan Pelayanan Publik ;																	Sekda Kab Muara Enim	
2	Tahapan 2 Penyusunan Instrumen Penyusunan dan Penerapan SPP Unit Kerja Kabupaten Muara Enim																	idem	
3	Tahapan 3 Penyusunan Rencana dan Strategi Penyusunan dan Penerapan SPP Unit Kerja Kabupaten Muara Enim																	Sekda Kab Muara Enim	
4	Konsolidasi dan Implementasi Rencana dan																	Sekda Kab	

No	Uraian Tahapan	TAHUN																PIC	Keterangan
		2012				2013				2014		2015		2016					
		1	2	3	4	1	2	3	4										
	Strategi Penyusunan dan Penerapan SPP Unit Kerja Kabupaten Muara Enim																	Muara enim	
5	Integrasi dan Finalisasi dokumen SPP Unit Kerja di Unit Kerja Kabupaten Muara Enim																	Sekda Kab Muara enim	
6	Penetapan Dokumen SPP Unit Kerja di Lingkungan Kabupaten Muara Enim																	Sekda Kab Muara enim	
B	Tahap 2. Internalisasi, Sosialisasi, dan Penerapan SPP																		
1	Internalisasi Dokumen SPP kepada Unit Kab Muara Enim																		
2	Sosialisasi Dokumen SPP Kab Muara Enim kepada <i>stakeholders</i>																		
3	Penerapan SPP Unit Kerja di Kab Muara Enim																		
B	Tahap 3. Pengukuran Dampak/ Perubahan																		
1	Tahapan 1 Penyusunan draft dokumen strategi manajemen																	Sekda	

No	Uraian Tahapan	TAHUN															
		2012				2013				2014	2015	2016	PIC	Keterangan			
		1	2	3	4	1	2	3	4								
	perubahan																
2	Tahapan 2: Mengevaluasi dan menilai dampak dari penyusunan dan penerapan SPP terhadap pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai Kabupaten Muara Enim																Sekda

Keterangan:

1. Uraian kegiatan pada masing-masing tahapan dapat dilihat pada poin a. Rencana Kerja Rinci
2. Setiap triwulan pelaksanaan program dan kegiatan dibagi dalam 3 bagian dan satu bagian mewakili pelaksanaan selama 1 bulan

10. PROGRAM MONITORING DAN EVALUASI

NAMA PROGRAM : MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

NAMA KEGLATAN : PENYUSUNAN STRATEGI MANAJEMEN PERUBAHAN DAN STRATEGI KOMUNIKASI

No	Uraian Tahapan	TAHUN																				PIC	Keterangan	
		2012				2013				2014				2015				2016						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1	Tahapan 1 Penyempurnaan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Program dan Kegiatan di Lingkungan Kabupaten Muara Enim																							
2	Tahapan 2 Pengembangan sistem informasi monitoring program dan kegiatan berbasis internet																							
3	Tahapan 3 Sosialisasi dan implementasi prosedur dan mekanisme monitoring dilakukan setelah pedoman dan sistem informasi monitoring tersusun, dan dilakukan melalui: • Rapat Pimpinan • Rapat Koordinasi • Kegiatan Sosialisasi																							

No	Urutan Tahapan	TAHUN																PIC	Keterangan				
		2012				2013				2014				2015						2016			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			1	2	3	4
4	Tahap 4 Implementasi dilaksanakan setelah tahapan sosialisasi dan internalisasi ke setiap unit kerja telah dilaksanakan secara efektif. Implementasi dilakukan berjenjang dimulai dari unit kerja di tingkat unit kerja eselon II, tingkat Satker dan Tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim akan dilakukan Evaluasi ketepatan																						
5	Tahap 5 Evaluasi ketepatan pelaksanaan proses monitoring sesuai standar dan mekanisme yang telah ditetapkan.																						
6	Mengevaluasi dampak yang ditimbulkan setelah disusunnya Sistem Informasi Monitoring Kegiatan dengan indikator: - Persentase kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana & target yang telah ditetapkan																						

Keterangan:

1. Uraian kegiatan pada masing-masing tahapan dapat dilihat pada poin a. Rencana Kerja Rinci
2. Setiap tahun pelaksanaan program dan kegiatan dibagi dalam 4 bagian dan satu bagian mewakili pelaksanaan selama 3 bulan

NAMA PROGRAM : MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
NAMA KEGIATAN : EVALUASI LIMA TAHUN

No	Urutan Tahapan	TAHUN																				PIC	Keterangan	
		2014				2015				2016				2017				2018						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1	Penyusunan Pedoman Evaluasi dan Monitoring Program dan Kegiatan di Lingkungan Kabupaten Muara Enim																							
2	Peningkatan pemahaman Satker dan Unit Kerja Eselon II mengenai penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan di Lingkungan Kabupaten Muara Enim																							
3	Sosialisasi dan implementasi prosedur dan mekanisme evaluasi dilakukan setelah pedoman dan penyempurnaan tersusun, dan dilakukan melalui: 1. Rapat Pimpinan 2. Rapat Koordinasi 3. Kegiatan Sosialisasi 4. Forum Evaluasi																							
4	Implementasi dilaksanakan setelah tahapan sosialisasi dan internalisasi ke setiap unit kerja telah dilaksanakan secara efektif. Implementasi dilakukan berjenjang dimulai dari unit																							

No	Uraian Tahapan	TAHUN																				PIC	Keterangan	
		2014				2015				2016				2017				2018						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
	kerja di tingkat unit kerja eselon II, tingkat Satker dan Tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim.																							
5	Evaluasi ketepatan pelaksanaan proses evaluasi sesuai standar dan mekanisme yang telah ditetapkan.																							
6	Mengevaluasi dampak yang ditimbulkan setelah diberlakukannya Pedoman Evaluasi dan Monitoring Kegiatan dengan indikator: • Persentase kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana & target yang telah ditetapkan • Persentase kegiatan yang memiliki penyerapan anggaran di atas 90% • Kecepatan tindakan koreksi atas penyimpangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan																							

Keterangan:

1. Uraian kegiatan pada masing-masing tahapan dapat dilihat pada poin a. Rencana Kerja Rinci
2. Setiap tahun pelaksanaan program dan kegiatan dibagi dalam 4 bagian dan satu bagian mewakili pelaksanaan selama 3 bulan

C. KRITERIA KEBERHASILAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN
1	Quick Wins	Kegiatan Pelayanan Publik Dasar Secara Online	1. Terbangunnya Sistem Informasi Pelayanan Dasar yang terintegrasi 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik bidang dasar 3. Naiknya indeks persepsi masyarakat tentang pelayanan publik 4. Jumlah akses stakeholders pada web;
		Kegiatan Pelayanan Publik Bidang Investasi Secara Online	1. Terbangunnya Sistem Informasi Pelayanan Publik bidang investasi 2. Peningkatan persepsi masyarakat perihal doing business di Kabupaten Muara Enim 3. Meningkatnya investasi di Muara Enim
		Kegiatan Pelayanan Berbasis Internet	1. Terbangunnya website yang dapat berfungsi sebagai media peningkatan layanan Kabupaten Muara Enim 2. Termasuknya website Kabupaten Muara Enim oleh <i>stakeholder</i>, identifikasi pemanfaatan dilakukan melalui evaluasi per triwulan.
2	Program Manajemen Perubahan	Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan Dan Strategi Komunikasi	1. Tersedianya dokumen Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi komunikasi 2. Tersosialisasikannya dan terinternalisasi reformasi birokrasi melalui manajemen perubahan kepada seluruh pegawai di lingkungan Kabupaten muara enim 3. Implementasi strategi manajemen perubahan
		Sosialisasi Dan Internalisasi Manajemen Perubahan	1. Meningkatnya kesadaran, pemahaman dan komitmen dari pimpinan dan seluruh jajaran pegawai di lingkungan Kabupaten Muara Enim untuk melaksanakan reformasi birokrasi

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN
			2. Terkonsolidasinya proses manajemen perubahan melalui persiapan dan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Kabupaten Muara Enim 3. Terbangunnya budaya e-learning dan budaya perubahan di Kabupaten Muara Enim
3	Penataan Peraturan Perundang Undangan	Identifikasi Peraturan Perundang – Undangan	Tersusunnya dokumen identifikasi peraturan/keputusan tahun 1978-2010 yang memuat hasil review dan evaluasi yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan deregulasi dan regulasi.
4	Penataan dan Penguatan Organisasi	Restrukturisasi/Penataan Tugas Dan Fungsi Unit Kerja Di Lingkungan Kabupaten Muara Enim	1. Struktur organisasi yang efektif dan efisien 2. Tingkat konflik dalam organisasi yang rendah 3. Persentase pencapaian tujuan organisasi meningkat
5	Penataan Tata laksana	Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi	1. Tersusunnya daftar kebutuhan SOP Kabupaten Muara Enim berdasarkan Tugas dan Fungsi; 2. Tersusunnya daftar SOP yang ada dan SOP yang belum ada; 3. Tersusunnya Instrumen Pengembangan SOP Kabupaten Muara Enim 4. Tersusunnya Rencana dan Strategi Pengembangan SOP Kabupaten Muara Enim 5. Terlaksananya kegiatan konsolidasi dan implementasi Rencana Strategi Pengembangan SOP Kabupaten Muara Enim 6. Terlaksananya pengembangan SOP Kabupaten Muara Enim 7. Tersusunnya Draft SOP Kabupaten Muara Enim 8. Tersusunnya Draft Akhir SOP Kabupaten Muara Enim, Dokumen SOP Kabupaten Muara Enim
		Penyusunan Tata Laksana (Business Process) Yang Menghasilkan E-Government Melalui Penerapan E-Office	1. Tersedianya Rencana Detail Pengembangan ICT Kabupaten Muara Enim 2. Tersedianya sistem operasi prosedur dan infrastruktur sesuai kebutuhan 3. Tersedianya Portal web lan dan dengan sub domainnya 4. Tersedianya Sistem Aplikasi tata persuratan 5. Tersedianya Sistem Aplikasi Kearsipan 6. Tersedianya Sistem Aplikasi SMS 7. Tersedianya Local Area Network (LAN) Intranet Information system 8. Tersedianya keamanan serta kecepatan system yang handal 9. Dapat diaksesnya Portal web lan dan dengan sub domain sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN
			www.muaraenimkab.go.id
6	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Penataan Sistem Rekrutmen Pegawai	1. Tersusunnya Sistem Rekrutmen Pegawai Kabupaten Muara Enim yang terbuka, transparan, dan akuntabel 2. Terpenuhiya kebutuhan pegawai pada satuan unit organisasi sesuai dengan standar kompetensi ; 3. Pelaksanaan Pengadaan Pegawai yang Terbuka, Transparan, Akuntabel, dan mudah diakses calonpelamar; 4. Tertatanya prosedur kerja yang efektif dan efisien
		Analisis Jabatan	1. Dokumen hasil analisis jabatan (uraian jabatan dan persyaratan jabatan) yang jelas dan telah memperhitungkan penilaian akurat tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik lain yang diperlukan. 2. Penetapan hasil analisis jabatan (uraian jabatan dan persyaratan jabatan). 3. Pelaksanaan/ Implementasi hasil analisis jabatan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan tiap jabatan 4. Peningkatan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan kinerja Kabupaten Muara enim
		Evaluasi Jabatan	1. Tersedianya ranking jabatan 2. Tersedianya tingkatan jabatan 3. Tersedianya hasil evaluasi jabatan 4. Tersedianya harga setiap jabatan 5. Terlaksananya pemberian tunjangan kinerja 6. Meningkatnya kinerja individu, unit dan institusi
		Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	1. Dokumen standar kompetensi pada setiap jabatan di Kabupaten Muara enim 2. Penetapan standar kompetensi jabatan 3. Pelaksanaan penggunaan standar kompetensi jabatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN
			4. Peningkatan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan kinerja Kabupaten Muara enim
		Assesmen Individu Berdasarkan Kompetensi	1. Inventarisasi kebutuhan assesmen terhadap pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kabupaten Muara Enim tersusun secara lengkap 2. Daftar urutan pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kabupaten Muara enim yang akan dinilai berdasarkan skala prioritas 3. Seluruh pejabat struktural dan fungsional Kabupaten Muara Enim telah diasses 4. Tersusunnya peta profil kompetensi individu seluruh pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kabupaten Muara Enim
		Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu	1. Pelomoran penilaian kinerja individu di Kabupaten Muara Enim 2. Penetapan sistem penilaian kinerja individu 3. Pelaksanaan sistem penilaian kinerja individu 4. Terukurnya Kinerja Individu pegawai Kabupaten Muara Enim 5. Peningkatan akuntabilitas dan produktivitas pelaksanaan kegiatan dan kinerja Kabupaten Muara Enim
		Pembangunan/Pengembangan Database Pegawai	1. Tersedianya/dilaksanakannya sistem database pegawai, perangkat lunak dan perangkat keras yang mendukung 2. Tersedianya data pegawai yang komprehensif, up todate dan valid
		Pengembangan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berbasis Kompetensi	1. Dokumen Pedoman Sistem Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berbasis Kompetensi di Kabupaten Muara Enim 2. Penetapan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berbasis Kompetensi 3. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berbasis Kompetensi 4. Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Dampak Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berbasis Kompetensi
7	Penguatan Pengawasan	Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim	1. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara maupun efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan strategis Kabupaten Muara Enim 2. Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik
		Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Sebagai <i>Quality</i>	1. Tersusunnya dokumen Pedoman Peraturan Bupati Muara Enim tentang Pengawasan Reguler di Lingkungan Kabupaten Muara Enim 2. Meningkatnya kinerja Kabupaten Muara enim secara keseluruhan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN
		<i>Assurance Dan Consulting</i>	
8	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Tersusunnya Pedoman Evaluasi Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 2. Tersosialisasikannya Pedoman Evaluasi Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 3. Meningkatnya pemahaman para pengelola kegiatan dalam menyusun laporan akuntabilitas kinerja
		1. Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi	1. Tersusunnya Instrumen Manajemen Kinerja bagi unit kerja di lingkungan Kabupaten Muara Enim 2. Tersosialisasikannya Peraturan Kabupaten Muara Enim tentang Manajemen Kinerja 3. Terimplementasikannya Peraturan Bupati Kabupaten Muara Enim tentang Manajemen Kinerja bagi unit kerja di lingkungan Kabupaten Muara Enim disertai dengan pemantauan terhadap progress atau kemajuan implementasinya.
		2. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Muara Enim	1. Tersusunnya draft peraturan Bupati Kabupaten Muara Enim tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Muara Enim 2. Tersosialisasikannya Peraturan Bupati Kabupaten Muara Enim tentang Indikator Kinerja Kabupaten Muara Enim 3. Terimplementasikannya Peraturan Bupati Kabupaten Muara Enim tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Muara Enim sebagai acuan utama seluruh unit kerja dalam menetapkan target kinerjanya.
9	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penerapan Standar Pelayanan Di Setiap Unit Kerja	1. Tersusunnya daftar Unit Kerja di Lingkungan Kabupaten Muara Enim yang menyelenggarakan Pelayanan Publik; 2. Tersusunnya Instrumen Penyusunan dan Penerapan SPP Unit Kerja Kabupaten Muara Enim; 3. Tersusunnya Rencana dan Strategi Penyusunan dan Penerapan SPP Unit Kerja Kabupaten Muara Enim; 4. Terlaksananya Konsolidasi dan Implementasi Rencana dan Strategi

NO	PROGRAM	KEGIATAN	KRITERIA KEBERHASILAN
			Penyusunan dan Penerapan SPP Unit Kerja Kabupaten Muara Enim; 5. Terlaksananya Integrasi dan Finalisasi dokumen SPP Unit Kerja di Lingkungan Kabupaten Muara Enim 6. Terlaksananya Penetapan Dokumen SPP Unit Kerja di Lingkungan Kabupaten Muara Enim; 7. Terlaksananya Internalisasi Dokumen SPP kepada Unit Kerja Kabupaten Muara Enim; 8. Terlaksananya Sosialisasi Dokumen SPP Kabupaten Muara Enim kepada stakeholders Kabupaten Muara Enim; 9. Terlaksananya penerapan SPP Unit Kerja di Lingkungan Kabupaten Muara Enim. 10. Terlaksananya pemantauan (monitoring) terhadap penyusunan penerapan SPP Unit Kerja di Lingkungan Kabupaten Muara Enim; 11. Terlaksananya evaluasi dan penilaian dampak dari penyusunan dan penerapan SPP terhadap pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai Kabupaten Muara Enim.
10	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1. Monitoring	1. Tersusunnya Pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan yang telah disempurnakan 2. Tersusunnya Sistem Informasi Monitoring Program dan Kegiatan 3. Menurunnya tingkat penyimpangan pelaksanaan Program dan Kegiatan
		2. Evaluasi Tahunan	1. Tersusunnya Pedoman Evaluasi dan Monitoring Program dan Kegiatan 2. Menurunnya tingkat penyimpangan pelaksanaan Program dan Kegiatan
			3. Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi Pencapaian Sasaran Jangka Menengah

AGENDA PRIORITAS DAN ANGGARAN

NO.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI	TAHUN PELAKSANAAN DAN KEBUTUHAN ANGGARAN (Jutaan)					Jumlah (Jutaan)
		2012	2013	2014	2015	2016	
QUICK WINS							
1.	E-service Bidang Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan)	•					
2.	E-service Bidang Pelayanan Perizinan Investasi	•					
3.	E-service Bidang Pelayanan Publik lainnya	•					
4.	E-Procurement	•					
Jumlah Kebutuhan Program Quick Wins							
PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN							
1.	Pembentukan Tim Manajemen Perubahan		•				
2.	Penyusunan Strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi		•				
3.	Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam rangka RB		•				
Jumlah Kebutuhan Anggaran Program Manajemen Perubahan							
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN							

NO.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI	TAHUN PELAKSANAAN DAN KEBUTUHAN ANGGARAN (Jutaan)					Jumlah (Jutaan)
		2012	2013	2014	2015	2016	
1.	Penataan berbagai Per-UU-an yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kabupaten Muara Enim						
Jumlah Kebutuhan Anggaran Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan							
PROGRAM PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI							
1.	Restrukturisasi/penataan tugas unit kerja di Kabupaten Muara Enim						
2.	Penguatan Unit organisasi yang secara fungsional melaksanakan fungsi organisasi, tataaksana, kepegawaian dan diklat						
Jumlah Kebutuhan Anggaran Program Penataan dan Penguatan Organisasi							
PROGRAM PENATAAN TATALAKSANA							
1.	Penyusunan Dokumen SOP Penyelenggaraan tugas dan fungsi yang disahkan						
2.	Pembangunan/pengembangan <i>e-office/e-government</i> di Kabupaten Muara Enim						
Jumlah Kebutuhan Anggaran Program Penataan Tataaksana							

NO.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI	TAHUN PELAKSANAAN DAN KEBUTUHAN ANGGARAN (Jutaan)					Jumlah (Jutaan)
		2012	2013	2014	2015	2016	
PROGRAM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR							
1.	Penataan Sistem Rekrutmen pegawai						
2.	Analisis Jabatan						
3.	Evaluasi Jabatan						
4.	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan						
5.	Assesment individu berdasarkan kompetensi						
6.	Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu						
7.	Pembangunan/pengembangan data base pegawai						
8.	Pengembangan Diklat Pegawai berbasis Kompetensi						
Jumlah Kebutuhan Anggaran Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur							
PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN							
1.	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)						

NO.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI	TAHUN PELAKSANAAN DAN KEBUTUHAN ANGGARAN (Jutaan)					Jumlah (Jutaan)
		2012	2013	2014	2015	2016	
2.	Peningkatan Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance dan consulting</i> .						
Jumlah Kebutuhan Anggaran Program Penguatan Pengawasan							
PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA							
1.	Penguatan AKIP						
2.	Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi						
3.	Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)						
Jumlah Kebutuhan Anggaran Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja							
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK							
1.	Penerapan Standar Pelayanan di setiap unit kerja						
Jumlah Kebutuhan Anggaran Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik							
PROGRAM MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN							

NO.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI	TAHUN PELAKSANAAN DAN KEBUTUHAN ANGGARAN (Jutaan)					Jumlah (Jutaan)
		2012	2013	2014	2015	2016	
1.	Monitoring						
2.	Evaluasi Tahunan						
3.	Evaluasi Menyeluruh (semester kedua tahun 2018)						
Jumlah Kebutuhan Anggaran Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik							

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

NO.	PROGRAM REFORMASI BIROKRASI	TAHUN PELAKSANAAN DAN KEBUTUHAN ANGGARAN (Jutaan)					Jumlah (Jutaan)
		2012	2013	2014	2015	2016	
1.	Monitoring						
2.	Evaluasi Tahunan						
3.	Evaluasi Menyeluruh (semester kedua tahun 2018)						
Jumlah Kebutuhan Anggaran Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik							




 BUPATI MUARA ENIM


 MUZAKIR SAI SOHAR